

ANALISIS PENGARUH SPREAD TINGKAT SUKU BUNGA BANK, CAR, DAN NPL TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM OLEH PERBANKAN DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SUKMA WARDHANI
NIM. C2B 607 053

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sukma Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2B607053

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH SPREAD TINGKAT
SUKU BUNGA BANK, CAR, DAN NPL
TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMKM
OLEH PERBANKAN DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Maruto Umar Basuki, SE, M.Si.

Semarang, 7 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

(Maruto Umar Basuki, SE., M.Si)

NIP. 19621028 199203 1009

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sukma Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2B607053

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH SPREAD
TINGKAT SUKU BUNGA BANK, CAR,
DAN NPL TERHADAP PENYALURAN
KREDIT UMKM OLEH PERBANKAN
DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juli 2011

Tim Penguji

1. Maruto Umar Basuki, SE.,MSi (.....)
2. Dr. Dwisetia P, M.Sc (.....)
3. Dra.Hj.Tri Wahyu R, M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sukma Wardhani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga Bank, CAR, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,

(Sukma Wardhani)

NIM. C2B607053

MOTTO

- ❖ *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*

(QS. Al Mu'minun:62)

- ❖ *Jangan Pernah Menganggap diri sendiri tidak mampu untuk melakukan sesuatu sebelum kita mencoba, mencoba dan mencobanya, karena dengan melihat saja itu tidak cukup.*

(Me)

- ❖ *Semua kita ini adalah orang orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi kelebihan kita dan meminimalkan kekurangan kita, karna keseimbangan ke semua unsur kita adalah kunci sukses yang akan kita raih. Kita bukan harus berhasil, bukan harus sukses, tapi kita harus mencoba untuk sukses tanpa kenal lelah dan kata menyerah, kegagalan adalah jenjang untuk sebuah kesuksesan bukan harus ditangisi dan disesali.*

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibu dan Bapakku Tercinta

Untuk Doa serta Nasehat yang terus diberikan tanpa mengenal waktu demi Kesuksesan dan Kebahagiaanku, Untuk kasih sayang yang tak tergantikan dari Tiap hembusan nafasmu dan Tidak akan pernah bisa tergantikan sampai kapanpun

Mas dan adekku

Untuk rasa cinta, kasih sayang dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sahabat & teman-temanku

Yang selalu mendoakan, membantu, menyemangati dan membawa keceriaan dalam segala hal.

ABSTRAKSI

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu saja, namun masih terdapat kebijakan lain yang juga mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan non ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ini berada di luar kontrol pemerintah. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh spread tingkat suku bunga kredit dan simpanan, CAR dan NPL terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan, dalam hal ini kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta nasional sesuai dengan perilaku masing-masing bank.

Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM), dengan metode lini diharapkan dapat menjelaskan perilaku jangka pendek maupun jangka panjang penelitian. Model kesalahan mampu menganalisis fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Selain itu, model ini mampu mencari pemecahan terhadap persoalan variabel *time series* yang tidak stasioner dalam ekonometrika.

Hasil Regresi dengan model ECM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel NPL berpengaruh negatif, sedangkan variabel RCDP dan CARS berpengaruh negatif dan tidak sesuai dengan hipotesis serta tidak signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Sementara dalam jangka panjang, variabel RCDP berpengaruh positif dan signifikan serta NPLP & NPLS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM, hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian.

Kata Kunci : Penyaluran Kredit UMKM, spread tingkat suku bunga bank, CAR, dan NPL.

ABSTRACT

Monetary policy is one of the policy that can affect a country economic activity, not only that, but there are other policies that also influence the economic activity, such as other policies which come from out of economic activity. However, the policies are from outside of government control. Monetary policy is a policy which can be used controlled by government. It can be used to achieve the economic development goals. The aims of this research to analyze how the effect from interest rate spreads, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing loan (NPL) to Micro, Small and medium to offer banking credit sector in Indonesia, particularly state banks and private banks according with each bank behavior.

The analyze method applied is Error Correction Model (ECM), the method is expected to explain long run and short run determinants of the research. The correction model is able to analyze of economic long run phenomena and assess consistence of empiric model with economic theory. More over, the model is able to find out the solutions from time series variable not stationary in econometric.

The result of analysis using ECM model banking kredit sector in state and private banks , shows that in short run determinants NPL variable gives negative and significant effect to UMKM offer banking credit sector and interest rate spreads (RCDP) and CARS variable shows that not suitable with hypothesis and insignificant. On the other hand, in long run determinants, interest rate spread(RCDP) for state banks gives the significant positive and NPLP & NPLS variable gives the negative significant effect to offer banking credit micro, small and medium business (UMKM) sector in Indonesia.

Key words : Offer banking credit sector UMKM, Interest rate spreads, CAR and NPL.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga Bank, CAR dan NPL Terhadap Penyaluran kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang.
2. Maruto Umar Basuki, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing atas segala masukan, kritik dan saran serta kesabaran yang telah diberikan dari awal hingga akhir disusunnya skripsi ini.
3. Prof.Drs.H. Waridin, MS, PhD. selaku Dosen Wali atas petunjuk, bimbingan dan saran selama penulis duduk di bangku kuliah.

4. Dosen Fakultas Ekonomi UNDIP pada umumnya dan Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi UNDIP pada khususnya yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan (Pak Gunawan dan Bu Elok) UNDIP yang telah turut membantu penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf dan perpustakaan Bank Indonesia, khususnya untuk Bu Tatik di BI Kota Semarang, yang telah banyak membantu memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Staf BPS Kota Semarang atas pemberian data dan kerja samanya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibuku tersayang, Eni Kurniawati dan Djoko Pramono, atas segala dukungan dan motivasi serta kasih sayang yang tiada ujung.
9. Mas dan adekku Chandra Sukmana dan Reina Dhamanik, yang telah memberikan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
10. M. Zulham Ulinuha yang telah memberikan dukungan, bantuan dan selalu memotivasi penulis agar tetap bersemangat dan pantang menyerah (*thanks full for your support*)
11. Saudara-Saudaraku (My sizta and Brother) mb ai, dita, mba yen, yana, bety, anggi, whisnu, bang il, popo.
12. Sahabat SMA ku nyo-nyo dan devi, yang selalu menyempatkan sedikit waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita penulis.

13. Teman-teman villa keramas yang sudah rela memberikan tumpangan tempat untuk mengerjakan tugas-tugas, ciripi, jeje, hasya, lifta, wanti, nisa, nita terima kasih banyak, i love u all.
14. Teman-teman seperjuanganku IESP angkatan 2007.
15. Teman-teman sesama bimbinganku, mas dedi, mas adi, mbak mira, bety, teguh..tetap semangat, pasti bisa guys.
16. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis mengharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 20 Juli 2011

Penulis,

Sukma Wardhani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
1.4 Sistematika Penulisan	21
 BAB II TELAAH PUSTAKA	 23
2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1 Kebijakan Moneter.....	23
2.1.2 Instrumen Kebijakan Moneter	23
2.1.3 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter.....	25
2.1.4 Tenggang Waktu (<i>Lag</i>) dalam Kebijakan Moneter	31
2.1.5 Tingkat Bunga	32

2.1.5.1 Teori Loanable Funds.....	32
2.1.5.2 Teori Liquidity Preference.....	33
2.1.5.3 Tingkat Bunga Murni, Premi Risiko, dan Biaya Transaksi.....	34
2.1.5.4 Tingkat Bunga Nominal.....	34
2.1.5.5 Tingkat Bunga Riil.....	35
2.1.5.6 Spread.....	35
2.1.6 Kredit.....	37
2.1.7 Perbankan	49
2.1.8 Capital Adequacy Ratio (CAR).....	52
2.1.9 Non Performing Loan (NPL).....	56
2.1.10 Profit Maximization.....	57
2.2. Penelitian Terdahulu	59
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	66
2.4. Hipotesis.....	67
BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Variabel Penelitian	68
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	70
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	70
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	71
3.5 Metode Analisis Data.....	71
3.5.1 Uji Stasionaritas	76
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	78
3.5.3 Uji Statistik.....	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	88
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	88
4.2. Hasil Pengujian Stasionaritas	93

4.2.1 Uji Akar Unit (<i>Unit Root Test</i>)	93
4.2.1.1 Uji Akar-akar Unit	93
4.2.1.2 Uji Derajat Integrasi	94
4.2.2 Uji Kointegrasi	95
4.2.3 Uji Asumsi Klasik ECM (Jangka Pendek)	96
4.2.3.1 Deteksi Normalitas	96
4.2.3.2 Deteksi Multikolinearitas	98
4.2.3.3 Deteksi Autokorelasi	100
4.2.3.4 Deteksi Heterokedastisitas	101
4.2.4 Uji Asumsi Klasik ECM Jangka Panjang	103
4.2.4.1 Deteksi Normalitas	103
4.2.4.2 Deteksi Multikolinearitas	104
4.2.4.3 Deteksi Autokorelasi	106
4.2.4.4 Deteksi Heterokedastisitas	108
4.3 Hasil Analisis ECM Jangka Pendek	109
4.3.1 Pengujian Statistik Kelompok Bank Pemerintah	110
4.3.1.1 Koefisien Determinasi (R^2)	110
4.3.1.2 Uji f-Statistik	111
4.3.1.3 Uji t-Statistik	111
4.3.2 Pengujian Statistik Kelompok Bank Swasta Nasional	115
4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)	115
4.3.2.2 Uji f-Statistik	116
4.3.2.3 Uji t-Statistik	116
4.4 Hasil Analisis Model ECM Jangka Panjang	120
4.4.1 Pengujian Statistik Kelompok Bank Pemerintah	120
4.4.1.1 Koefisien Determinasi (R^2)	120
4.4.1.2 Uji f-Statistik	121
4.4.1.3 Uji t-Statistik	121
4.4.2 Pengujian Statistik Kelompok Bank Swasta Nasional	125

4.4.2.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	125
4.4.2.2 Uji f-Statistik.....	126
4.4.2.3 Uji t-Statistik.....	126
4.5 Pembahasan dan Intrepretasi Hasil.....	130
4.5.1 Pengaruh Spread Terhadap Penyaluran Kredit UMKM..	131
4.5.2 Pengaruh CAR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM....	134
4.5.3 Pengaruh NPL Terhadap Penyaluran Kredit UMKM....	136
4.5.4 Variabel Koreksi Kesalahan (ECT).....	137
BAB V PENUTUP	139
5.1 Kesimpulan	139
5.2 Keterbatasan	145
5.3 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	152

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Data Sektor Usaha UMKM di Indonesia Periode(2005-2009).....	13
Tabel 3.1 Variabel, Definisi Operasional, dan Satuan ukur Penelitian.....	69
Tabel 4.1 Uji Akar-Akar Unit.....	93
Tabel 4.2 Uji Derajat Integrasi I(I).....	94
Tabel 4.3 Uji Kointegrasi.....	95
Tabel 4.4 Regresi Parsial Model ECM (jangka pendek).....	98
Tabel 4.5 BG Test Model ECM kelompok bank pemerintah.....	100
Tabel 4.6 BG Test Model ECM kelompok bank swasta nasional.....	101
Tabel 4.7 White Test ECM kelompok bank pemerintah.....	102
Tabel 4.8 White Test ECM kelompok bank swasta nasional.....	102
Tabel 4.9 Regresi parsial model ECM jangka panjang.....	105
Tabel 4.10 BG test ECM jangka panjang kelompok bank pemerintah.....	107
Tabel 4.11 BG test ECM jangka pendek kelompok bank swasta nasional.....	107
Tabel 4.12 White test ECM jangka panjang kelompok bank pemerintah.....	108
Tabel 4.13 White test ECM jangka panjang kelompok bank swasta nasional.	108
Tabel 4.14 Regresi Model ECM (jangka pendek) kelompok bank pemerintah	110
Tabel 4.15 Regresi Model ECM (jangka pendek) kelompok bank swasta nasional.....	115
Tabel 4.16 Regresi ECM jangka panjang kelompok bank pemerintah.....	120
Tabel 4.17 Regresi ECM jangka panjang kelompok bank swasta nasional....	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Posisi Kredit Kelompok Bank Pemerintah dan Kelompok Bank Swasta Nasional Periode 2003-2010 (Milyar Rp).....	6
Gambar 1.2 Posisi <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Kelompok Bank Pemerintah dan Swasta Nasional Periode 2003-2010 (%)...	6
Gambar 1.3 Posisi Suku Bunga Pinjaman, Simpanan dan SBI Periode 2005 -2010 (%).....	9
Gambar 1.4 Spread Tingkat Bunga Kredit dan Tingkat Bunga Simpanan Periode 2003-2009 (%).....	10
Gambar 1.5 Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Terhadap Volume Kredit Periode 2003-2009 (%).....	11
Gambar 1.6 Posisi Kredit UMKM Atas Total Kredit Kelompok Bank Pemerintah dan Swasta Nasional Periode Tahun 2004-2010 (Milyar Rp).....	15
Gambar 1.7 Posisi Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Kelompok Bank Pemerintah dan Swasta Nasional Periode Tahun 2003-2009 (Milyar Rp).....	17
Gambar 2.1 Keseimbangan Pasar Dana Investasi (<i>loanable funds</i>).....	33
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	66
Gambar 3.1 Uji t Hipotesis Secara Parsial ($H_0 \leq 0$) $\alpha = 0,05$	84
Gambar 3.2 Uji t Hipotesis Secara Parsial ($H_0 \geq 0$) $\alpha = 0,05$	85
Gambar 3.3 Uji F Hipotesis Secara Simultan $\alpha = 0,05$	86
Gambar 4.1 Volume Kredit UMKM Kelompok Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional Periode Tahun 2004-2010 (Milyar Rp)...	88

Daftar Gambar (Lanjutan)

Gambar 4.2 Kredit Usaha Mikro, Kecil & Menengah Menurut Penggunaanya Periode Tahun 2004-2009 (Milyar Rupiah).....	91
Gambar 4.3 Proporsi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Total Kredit Periode Tahun 2004-2010 (Milyar Rp).....	92
Gambar 4.4 Deteksi Normalitas Model ECM (Jangka pendek) Kelompok Bank Pemerintah.....	97
Gambar 4.5 Deteksi Normalitas Model ECM (Jangka pendek) Kelompok Bank Swasta Nasional.....	97
Gambar 4.6 Deteksi Normalitas Model Jangka Panjang Kelompok Bank Pemerintah.....	103
Gambar 4.7 Deteksi Normalitas Model Jangka Panjang Kelompok Bank Swasta Nasional.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data Mentah.....	153
Lampiran B	Uji Stasionaritas.....	156
Lampiran C	Uji Kointegrasi.....	172
Lampiran D	Hasil Regresi ECM Jangka Pendek.....	174
Lampiran E	Hasil Regresi Model ECM Jangka Panjang.....	176
Lampiran F	Uji Asumsi Klasik Model Jangka Panjang.....	178
Lampiran G	Uji Asumsi Klasik Model ECM Jangka pendek.....	187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Selain kebijakan moneter masih terdapat kebijakan lain yang juga berperan di dalamnya, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan yang berasal dari non ekonomi. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Dengan demikian, secara tidak langsung kebijakan moneter akan berpengaruh terhadap kegiatan dan kondisi perekonomian. Kondisi dan kegiatan perekonomian dapat tercermin antara lain dari tingkat GNP, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Suku bunga SBI, Nilai tukar Rupiah, Pengangguran, Neraca Pembayaran, dan masih terdapat indikator lainnya (Nopirin, 2000).

Pengaruh kebijakan moneter berdampak langsung pada sektor perbankan. Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi dan mengontrol sistem moneter di Indonesia memiliki beberapa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui beberapa saluran, diantaranya adalah saluran uang, saluran kredit, saluran suku bunga, saluran nilai tukar, saluran harga aset dan saluran ekspektasi (Perry Warjiyo, 2004). Mekanisme transmisi moneter ini dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter, seperti Operasi Pasar Terbuka, Giro Wajib minimum (*reserve requirement*), Tingkat Diskonto dan Himbauan.

Dari beberapa mekanisme transmisi kebijakan moneter tersebut, saluran suku bunga lah yang paling berperan, terutama karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap sektor riil melalui perkembangan modal kerja, konsumsi dan investasi (Perry Warjiyo, 2004).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara membutuhkan pola pengaturan sumber-sumber daya yang tersedia secara terarah dan terpadu. Dengan demikian, hasil yang optimal bisa didapat dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-Lembaga ekonomi harus melaksanakan pola tersebut secara bersamaan agar tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Lembaga keuangan, khususnya perbankan mempunyai peran yang strategis dalam meenggerakkan roda perekonomian suatu negara. Pada dasarnya, bank disebut sebagai alat pembangunan negara (*agent of development*) dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Abidan Tuah, 2007).

Perbankan adalah media yang menjembatani antara sektor moneter dengan sektor riil. Perbankan merupakan intermediator dalam menampung dana yang berlebih dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Peran perbankan dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu pengalokasian agar alokasi dana dapat efisien. Selain itu, perbankan juga memiliki kemampuan untuk mengetahui masalah informasi asimetris yang terjadi di pasar kredit. Sebagai penghubung antara investor dan pengusaha , perbankan mampu memberikan informasi yang seimbang antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi bank sebagai perantara

(*intermediary*), sehingga kepercayaan masyarakat luas sebagai nasabah kian bertambah (Abidan Tuah, 2007).

Sektor perbankan dalam keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, terutama kondisi moneter. Fenomena krisis moneter dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengakibatkan bank enggan untuk mengucurkan dana kreditnya ke sektor pelaku usaha. Dalam keadaan seperti ini, bank lebih memilih untuk mengalokasikan dana atau kreditnya kepada sektor yang dianggap lebih aman dan menyakinkan. Sebagai contoh, peristiwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, kredit perbankan mengalami volume penurunan yang cukup tajam. Dengan demikian, berdampak pada beberapa sektor yang mempengaruhinya, terutama pada sektor riil. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penentu pemulihan kondisi perekonomian pascakrisis moneter yang berjalan lebih lambat dibanding negara-negara di Asia lainnya seperti Korea Selatan dan Thailand (Juda Agung et,al, 2001).

Menurunnya kredit perbankan dapat disebabkan dari faktor permintaan ataupun penawaran kredit. Dari sisi penawaran misalnya, penarikan dana nasabah yang ada di bank secara bersamaan (*bank rush*) dan meningkatnya kewajiban pembayaran terhadap luar negeri menjadi pemicu awal terjadinya penurunan kredit perbankan. Sementara itu, ketika suku bunga dan nilai tukar rupiah melonjak tajam para investor perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memperoleh pendanaan utama dari perbankan menambah persoalan berupa meningkatnya jumlah kredit macet (NPL) yang cukup tinggi nilainya . Di sisi lain, tingginya suku bunga juga mengakibatkan margin bunga (selisih antara suku

bunga kredit dengan deposito) yang bernilai negatif akan menurunkan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan secara drastis. Kesulitan likuiditas yang dialami oleh perbankan dan perusahaan akan menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak ini menjadi terganggu dan berdampak pada kebutuhan pendanaan di sektor riil yang menjadi semakin terbatas.

Di sisi permintaan, penurunan kredit perbankan dapat terjadi karena rendahnya prospek investasi (*investment opportunities*) dan konsumsi, serta belum pulihnya kondisi finansial perusahaan. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya rasio hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Rendahnya prospek investasi dan konsumsi ini tercermin dari porsi posisi kredit investasi dan konsumsi pada bank pemerintah dan swasta nasional.

Sampai awal tahun 2001, kondisi sektor perbankan menunjukkan adanya indikasi perbaikan. Hal ini dilihat dari membaiknya permodalan secara agregat dan margin tingkat bunga yang bernilai positif. Di sisi lain, kondisi ini tidak diikuti dengan meningkatnya porsi penyaluran kredit perbankan. Kondisi yang seperti ini dinamakan sebagai situasi *credit crunch* , yakni penurunan kemauan/keinginan perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa diikuti kenaikan tingkat bunga pinjaman (Pasarbasioglu dalam Abidan Tuah, 2004). Keadaan *credit crunch* terjadi karena perbankan merasakan risiko yang tinggi dan keuntungan yang rendah apabila menyalurkan kredit ke masyarakat.

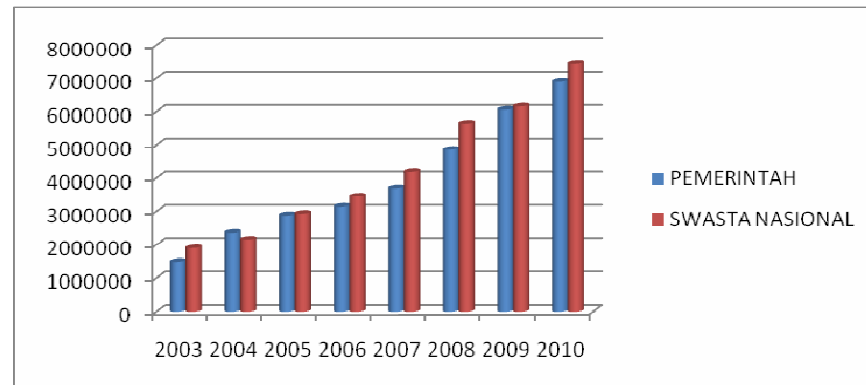
Perilaku perbankan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan moneter dan sebaliknya. (Stiglitz dan Greenwald dalam Abidan Tuah, 2007) berpendapat bahwa perilaku perbankan dalam menyikapi penawaran dan

permintaan kredit dalam perekonomian sangat penting dalam paradigma moneter yang baru. Perilaku ini dapat dilihat dari kuantitas kredit yang disalurkan dan dari harga (tingkat bunga kredit yang ditetapkan). Perilaku perbankan yang cenderung menghindari risiko akan sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana ke sektor riil. Apabila perbankan semakin enggan dalam menyalurkan kredit, maka pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada usaha dalam negeri akan mengalami keterhambatan.

Salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sumber penerimaan utama bank yang diharapkan pun juga berasal dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit tergolong aktiva aktif atau penerimaanya tinggi, maka sebagai konsekuensinya, penyaluran kredit juga mengandung risiko yang lebih tinggi.

Gambar 1.1 memperlihatkan tren posisi kredit kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta nasional. Perilaku penyaluran dana kredit antara kedua bank ini juga memperlihatkan tren yang berbeda. Sejak tahun 2005, bagi kelompok bank swasta nasional, penyaluran dana kredit menunjukkan tren yang relatif lebih tinggi daripada bank pemerintah walaupun perbedaanya sedikit. Pada tahun 2003 kelompok bank pemerintah menyalurkan dana kreditnya sebesar Rp 1.495.646 milyar dan secara bertahap meningkat menjadi Rp 6.895.954 milyar di tahun 2010. Sedangkan kelompok bank swasta nasional menyalurkan dana kreditnya sebesar Rp 1.900.860 milyar dan secara bertahap meningkat menjadi Rp 7.438.690 milyar di tahun 2010. Keterangan tersebut dapat diperjelas dengan melihat gambar 1.1

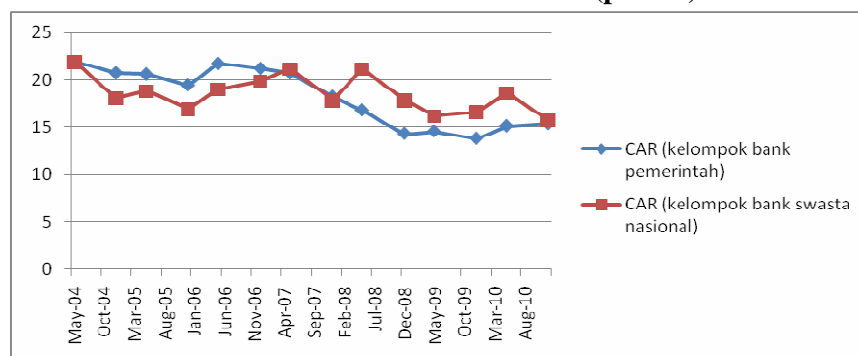
Gambar 1.1
Posisi Kredit Kelompok Bank Pemerintah dan Kelompok Bank Swasta Nasional Periode Tahun 2003-2010
(Milyar Rupiah)



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah berbagai tahun)

Volume kredit yang disalurkan oleh perbankan antara lain juga dipengaruhi oleh rasio kecukupan modal perbankan, yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah tingkat kecukupan modal yang diukur berdasarkan perhitungan *capital adequacy*. Perhitungan *adequacy* ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanam modal yang mengandung risiko, harus menyediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu (*risk margin*).

Gambar 1.2
Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR)
Kelompok Bank Pemerintah dan Swasta Nasional
Periode Tahun 2004-2010 (persen)



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah berbagai tahun)

Berdasarkan gambar 1.2 diketahui bahwa pergerakan posisi rasio kecukupan modal dari bank swasta nasional cenderung memiliki tren yang lebih tinggi dibandingkan pada bank pemerintah. Pada Juli 2005 rasio kecukupan modal bank swasta nasional mencapai posisi rasio di angka 28,42 persen dan menurun kemudian stabil kembali di kisaran angka 19,8 persen pada Juni 2006 dan terus mengalami penurunan hingga berada di posisi 15,76 persen pada Desember 2010, sedangkan CAR untuk bank pemerintah berada pada posisi 20,09 persen pada Juli 2005 dan terus mengalami penurunan hingga berada di kisaran angka 15,36 persen pada Desember 2010.

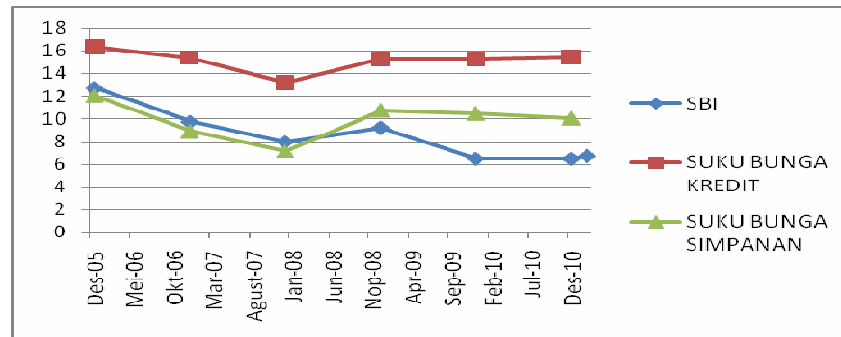
Menurut Peraturan bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko yang diproksikan dengan *Rasio Adequacy Ratio* (CAR). Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka bank Indonesia akan menempatkan bank tersebut ke dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Menurut Meydianawathi (2006), CAR yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya risiko yang dimiliki oleh bank sehingga memungkinkan bank untuk biasa lebih banyak menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Dengan kata lain terdapat hubungan CAR dengan penyaluran kredit yang searah.

Besarnya CAR dan volume kredit perbankan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. CAR adalah tingkat kecukupan modal yang diukur berdasarkan perhitungan *capital adequacy*. Besaran CAR dipengaruhi besarnya modal inti dan modal pelengkap yang dimiliki perbankan. Selain itu,

besarnya CAR juga didasarkan pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito perbankan, sedangkan volume kredit dipengaruhi tingkat bunga kredit. Dalam menetapkan tingkat bunga kredit, selain memperhatikan faktor risiko, bank juga mengacu pada tingkat bunga instrumen moneter, yaitu tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (*BI-rate*). SBI merupakan instrumen pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter.

Besarnya bunga yang ditawarkan untuk simpanan akan sangat berpengaruh terhadap bunga pinjaman. Dalam Industri perbankan yang sangat kompetitif ini, penentuan tingkat bunga kredit menjadi suatu alat persaingan yang sangat strategis. Bank-bank yang mampu mengendalikan komponen-komponen pokok dalam penentuan tingkat bunga kredit (*lending rate*) akan mampu menentukan tingkat bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lain yang tidak mampu untuk mengendalikan komponen-komponen pokok dalam penentuan tingkat bunga kredit (*lending rate*). Komponen-komponen yang menentukan tingkat bunga kredit antara lain adalah *Cost of Loanable funds*, *Overhead cost*, *Risk Factor*, spread, dan pajak. Hal inilah yang menyebabkan rentang atau jarak antara SBI selaku suku bunga acuan dengan suku bunga simpanan maupun pinjaman cukup jauh nilainya. Mengenai perkembangan SBI selaku suku bunga acuan, suku bunga kredit dan suku bunga simpanan secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3
Posisi Suku Bunga Pinjaman, Simpanan dan SBI
Periode Tahun 2005 -2010 (persen)



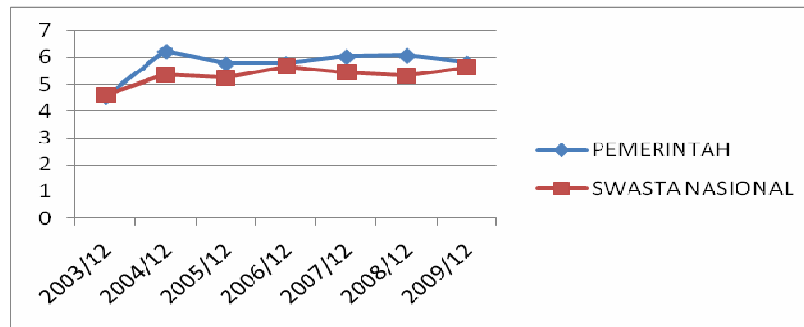
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia(diolah berbagai tahun)

Gambar 1.3 memperlihatkan tren dari tingkat bunga SBI, suku bunga kredit dan simpanan. Secara keseluruhan, ketiga tingkat bunga memiliki tren yang relatif sama. Mulai Desember 2007 hingga pertengahan tahun 2010 tren suku bunga SBI relatif stabil, yaitu dikisaran angka 6,5 persen. Tingkat bunga pinjaman dan simpanan memiliki kecenderungan untuk mengikuti pergerakan dari SBI. Baik tingkat bunga pinjaman maupun simpanan sejak Desember 2010 juga mengalami kecenderungan menurun yaitu di kisaran angka 15,50 persen dan 10,48 persen.

Di dalam usahanya, bank mengharapkan tingkat keuntungan yang maksimal . Keuntungan tersebut sebagian besar diperoleh dari selisih antara tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga simpanan. Keuntungan ini akan semakin besar jika volume kredit yang disalurkan juga semakin besar nilainya, serta selisih bunga simpanan dengan pinjaman (*spread atau net margin*) juga semakin besar. Pendapatan terbesar bank berasal dari selisih antara pendapatan pinjaman (tingkat bunga pinjaman dikali volume pinjaman yang disalurkan)

dengan pendapatan simpanan (tingkat suku bunga simpanan dikali volume dana yang disimpan bank). Besar kecilnya keuntungan tergantung dari spread antara tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga simpanan.

Gambar 1.4
Spread Tingkat Bunga Kredit dan Tingkat Bunga Simpanan
Periode Tahun 2003-2009 (persen)



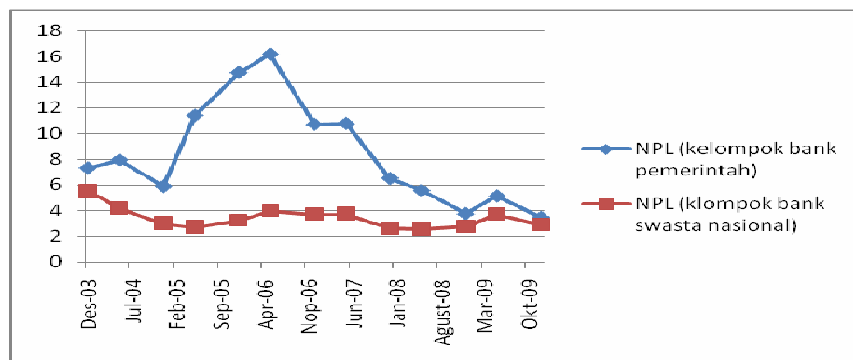
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah berbagai tahun)

Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa *spread* tingkat bunga pinjaman dan simpanan untuk kedua kelompok bank mengalami tren yang relatif stabil dan terdapat kecenderungan untuk menurun. Bank pemerintah memiliki *spread* dengan rata-rata di kisaran 6,23 persen pada Desember 2004 dan menurun pada posisi 5,81 persen pada Desember 2009, sedangkan posisi *spread* untuk kelompok bank swasta nasional berada pada kisaran 5,35 persen pada Desember 2004 dan sedikit mengalami peningkatan di kisaran 5,64 persen Pada Desember 2009. *Spread* tingkat suku bunga kredit dan simpanan bagi kelompok bank swasta terlihat selalu lebih rendah dibanding bank pemerintah.

Di sisi lain, Kondisi perbankan juga dapat diamati dari nilai NPL dan rasio NPL terhadap volume kredit yang disalurkan. Nilai NPL kelompok bank pemerintah relatif lebih tinggi nilainya dibanding kelompok bank swasta nasional. Nilai NPL kelompok bank pemerintah mengalami penurunan bertahap dari

Rp 37.813 milyar pada Desember 2005 menjadi Rp 17.594 milyar pada Desember 2008. Namun, nilai ini kembali mengalami kenaikan mencapai Rp 25.204 milyar pada Mei 2009. Jika melihat rasio NPL terhadap kredit, maka tren yang dimiliki cenderung menurun dari 16,30 persen pada Oktober 2006 menjadi 3,46 persen pada Desember 2009, sedangkan rasio NPL bank swasta nasional sejak 2003-2009 berada pada kisaran posisi 3,74 persen terhadap total kredit. Posisi NPL tertinggi berada pada Rp 18.742 milyar di bulan November 2009 dan terendah di bulan Juni 2003 pada Rp 6.620 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kinerja penyaluran kredit bank swasta nasional mengalami perbaikan dengan semakin rendahnya rasio kredit macet terhadap total kredit. Dapat disimpulkan bahwa, nilai NPL mengalami perkembangan yang baik dengan indikasi penurunan rasio NPL terhadap total kredit yang disalurkan. Keterangan tersebut dapat diperjelas dengan melihat Gambar 1.5

Gambar 1.5
Rasio Non Performing Loan (NPL) Terhadap Volume Kredit
Periode Tahun 2003-2009 (persen)



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah berbagai tahun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh spread tingkat bunga pinjaman dengan simpanan, CAR dan NPL serta

kinerja kelompok perbankan pemerintah dan swasta nasional sesuai dengan perilakunya masing-masing terhadap penyaluran kredit ke sektor riil, khususnya untuk sektor UMKM. Seperti yang telah diutarakan pada pendahuluan, perilaku perbankan memiliki pengaruh yang dominan terhadap sektor riil.

Di Indonesia, sektor usaha yang ada sebagian besar adalah sektor usaha Mikro/Rumaha Tangga, Kecil dan Menengah (UMKM). Tabel 1.1 memperlihatkan bagaimana tren dari perkembangan sektor usaha UMKM di Indonesia. Perkembangan sektor usaha UMKM cenderung meningkat sejak tahun 2005-2009. Untuk indikator unit usaha mengalami perkembangan bertahap dari 47.017.062 unit pada 2005 menjadi 52.764.603 unit di tahun 2009 atau sebesar 12,22 persen. Indikator tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari 83.586.616 orang pada 2005 menjadi 96.211.332 orang di tahun 2009 atau mengalami perkembangan sebesar 15,20 persen. Indikator PDB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 1.494.631,9 milyar pada 2005 menjadi Rp 2.993.151,7 milyar di tahun 2009 atau mengalami perkembangan sebesar 100,26 persen. Indikator PDB atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari Rp 979.501,3 milyar pada 2005 menjadi Rp 1.214.725 milyar di tahun 2009 atau mengalami perkembangan sebesar 24,01 persen. Sedangkan untuk indikator total atas ekspor non migas juga mengalami peningkatan dari Rp 110.338,1 milyar menjadi Rp 162.254 milyar di tahun 2009 atau mengalami perkembangan sebesar 47,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan dan kondisi sektor usaha kecil mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2005 hingga 2009.

Tabel 1.1
Perkembangan Data Sektor UMKM di Indonesia
Periode Tahun (2005-2009)

Indikator	Unit	2005	2006	2007	2008	2009	Perkembangann dari tahun05-09
unit usaha	unit	47.017.062	49.021.803	50.145.800	51.409.612	52.764.603	12,22
Tenaga kerja	orang	83.586.616	87.909.598	90.491.930	94.024.278	96.211.332	15,20
PDB atas dasar hrg berlaku	Milyar	1.494.631,9	1.783.423,8	2.107.868,1	2.613.226,1	2.993.151,7	100,26
PDB atas dasar konstan 2000	Milyar	979.501,3	1.035.615,3	1.100.670,9	1.165.753,2	1.214.725,3	24,01
Expor non migas	Milyar	110.338,1	123.767,9	140.363,8	178.008,3	162.254,5	47,05

Sumber : Data UMKM Depkopnas (diolah berbagai tahun)

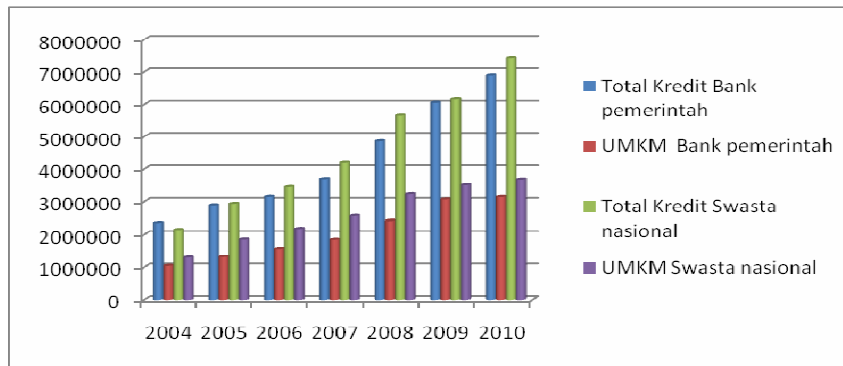
Sektor UMKM pada umumnya menghadapi masalah yang seragam yaitu dalam aspek permodalan. Masalah ini terjadi dalam mobilisasi dana awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja jangka panjang. Terkadang usaha kecil dan menengah juga menggunakan dana pribadi untuk menjalankan usahanya, namun seringkali dana tersebut tidak mencukupi dan dirasa kurang. Pendanaan modal kerja usaha kecil dan Menengah di Indonesia tidak dipungkiri memang sangat bergantung pada akses kredit dari perbankan (Tambunan dalam Abidan Tuah, 2007).

Dengan potensi dari sektor UMKM serta ketergantunganya dari segi pembiayaan usaha terhadap bank, maka penting untuk melihat perkembangan volume kredit usaha kecil atas total kredit yang disalurkan oleh perbankan. Posisi kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan oleh kelompok bank swasta

nasional memperlihatkan indikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bank pemerintah. Dana kredit yang disalurkan oleh kelompok bank pemerintah meningkat secara bertahap dari Rp 2.365.257 milyar pada 2004 menjadi Rp 3.695.704 milyar di tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan Rp 6.895.954 milyar pada akhir tahun 2010, sedangkan kredit untuk UMKM meningkat dari Rp 1.046.008 milyar pada 2004 menjadi Rp 1.848.344 milyar di tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 3.681.417 milyar di tahun 2010 . Di sisi lain, dana kredit yang disalurkan oleh kelompok bank swasta nasional juga mengalami peningkatan secara bertahap dari Rp 2.153.724 milyar pada tahun 2004 menjadi Rp 4.193.208 milyar di tahun 2007 dan terus meningkat hingga mencapai Rp 7.438.690 milyar pada akhir tahun 2010, sedangkan dana untuk kredit usaha kecil dari Rp 1.302.185 milyar pada tahun 2004 menjadi Rp 2.558.088 milyar di tahun 2007 dan terus meningkat hingga Rp 3.681.141 milyar pada akhir tahun 2010 .

Hal ini mengindikasikan bahwa pola penyaluran dana atas total kredit maupun dana kredit UMKM kelompok bank swasta nasional menunjukkan tren yang lebih tinggi dibanding pola penyaluran dana atas total kredit maupun dana kredit UMKM oleh kelompok bank pemerintah. Keterangan tersebut dapat diperjelas dengan melihat Gambar 1.6.

Gambar 1.6
Posisi Kredit UMKM Atas Total Kredit Kelompok Bank Pemerintah dan Swasta Nasional Periode Tahun 2004-2010 (Milyar rupiah)



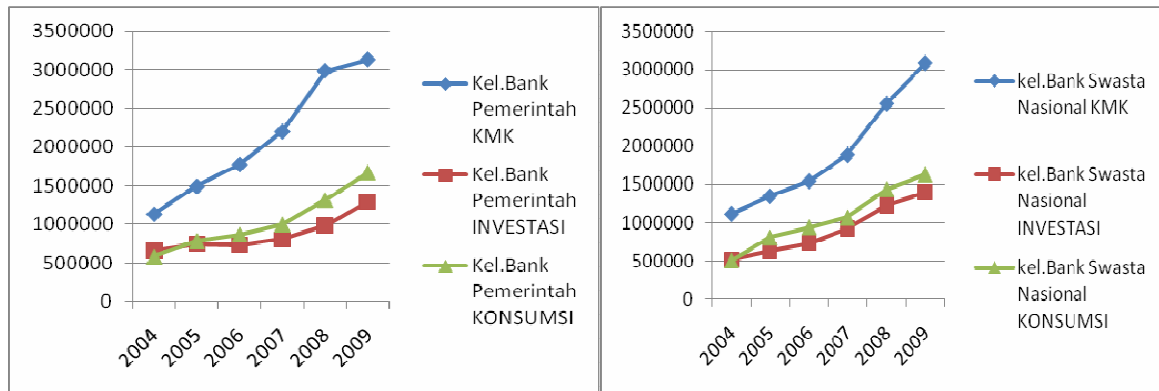
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia(diolah berbagai tahun)

Sektor kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perkembangannya berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan usaha ini. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001, pemerintah melalui Bank Indonesia merubah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/4/KEP/DIR tanggal 4 April 1997 tentang pemberian kredit usaha kecil dan menengah sehingga menghapus kewajiban perbankan untuk menyalurkan 20-25 % dari total kreditnya ke kredit usaha kecil. Kebijakan ini dianggap menyebabkan penyaluran kredit usaha kecil oleh perbankan mengalami kelesuan, terutama pada kelompok bank swasta (Siregar dalam Abidan Tuah, 2007).

Sektor usaha atau sektor riil merupakan salah satu sasaran alokasi dana perbankan berupa kredit. Berdasarkan penggunaannya, sejak tahun 2004 hingga 2010 kredit UMKM modal kerja bagi kedua kelompok bank memiliki porsi paling besar dibandingi porsi untuk kredit investasi dan konsumsi. Kondisi ini baik karena penggunaan kredit oleh usaha mikro, kecil dan menengah memang sebagai

kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai pembiayaan satu siklus usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha, khususnya sektor UMKM di Indonesia telah mengalami perkembangan. Kredit UMKM modal kerja bagi kedua kelompok bank relatif stabil dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sejak Januari 2004, kredit UMKM untuk penggunaan modal kerja kelompok bank pemerintah sebesar Rp 1.131.168 milyar dan terus meningkat hingga Rp 3.131.361 milyar di tahun 2009 atau meningkat sebesar 176,8 persen, sedangkan kredit UMKM untuk penggunaan investasi meningkat dari Rp 661.317 milyar pada tahun 2004 mencapai Rp 1.295.937 milyar di tahun 2009 atau meningkat sebesar 95,96 persen dan kredit UMKM untuk penggunaan konsumsi meningkat dari Rp 585.226 milyar pada tahun 2004 mencapai Rp 1.674.140 milyar di tahun 2009 atau 168,07 persen. Perkembangan tren penyaluran kredit UMKM berdasarkan penggunaan menunjukkan bahwa kelompok bank swasta nasional lebih tinggi dibanding kelompok bank pemerintah. Kredit modal kerja kelompok bank swasta nasional meningkat dari Rp 118.715 milyar pada tahun 2004 mencapai Rp 3.088.423 milyar di tahun 2009, sedangkan kredit UMKM penggunaan investasi meningkat dari Rp 513.780 milyar pada tahun 2004 mencapai Rp 1.400.894 milyar di tahun 2009 dan kredit UMKM untuk penggunaan konsumsi meningkat dari Rp 509.101 milyar pada tahun 2004 mencapai posisi Rp 1.629.247 milyar di tahun 2009. Keterangan tersebut dapat diperjelas dengan melihat gambar 1.7

Gambar 1.7
Posisi Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi Kelompok Bank
Pemerintah dan Swasta Nasional Periode Tahun 2004-2009 (Milyar Rp)



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah berbagai tahun)

Berdasarkan Gambar 1.7 mengenai kredit yang mampu disalurkan oleh bank pemerintah dan swasta nasional yang ada di Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa kredit perbankan nasional sejak tahun 2004-2009 terus mengalami kenaikan baik untuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. Dari komposisi penyaluran kredit ketiga kredit tersebut, kredit modal kerja menempati urutan pertama. Kredit modal kerja yang diberikan ini diharapkan mampu menggerakkan laju perekonomian dan mampu diserap oleh sektor riil dengan baik.

Penyaluran kredit khususnya sektor UMKM dipengaruhi oleh nilai balik alokasi dana bank (Abidan Tuah, 2007). Hal tersebut sesuai dengan tingginya risiko berusaha yang dialami oleh pelaku sektor riil UMKM. Pada masa krisis, banyak perusahaan yang tidak kuat menanggung kurs dan tingkat bunga tinggi, seperti yang terjadi pada industri tekstil. Pada saat permintaan melonjak, di sisi lain harga bahan-bahan modal justru mengalami kenaikan yang berdampak pada inflasi, belum lagi keresahan sosial ekonomi, gangguan keamanan, penarikan dana

dari perbankan secara bersamaan dan besar-besaran serta stagflasi. Di saat seperti itu, sektor UMKM memiliki kemampuan dan tetap bertahan serta memiliki kelebihan dalam menghadapi krisis.

Besarnya kredit UMKM yang disalurkan perbankan dipengaruhi perilaku bank dalam mengelola dananya serta bagaimana kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan melihat kondisi keadaan tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh spread tingkat suku bunga perbankan (pinjaman dan simpanan), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan NPL (*Non Performing Loan*) terhadap volume kredit UMKM yang disalurkan perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar di dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini berfungsi sebagai lembaga perantara atau intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, perbankan juga menampung dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pinjaman (*loan supply*) untuk kegiatan sektor-sektor perekonomian yang potensial dan produktif.

Perilaku perbankan dalam mengelola porto folio berkaitan dengan prinsip keuntungan maksimum. Pada prinsip keuntungan maksimum, alokasi terbesar dana perbankan ada dalam bentuk pinjaman atau kredit (*loan portfolio*). Pertimbangan bank dalam mengelola portofolio ini tidak hanya dipengaruhi tingkat bunga yang sedang berlaku, prospek ekonomi, kondisi internal bank, kebijakan pemerintah, serta kondisi usaha yang terjadi (sektor riil). Namun juga

dipengaruhi oleh perilaku bank dalam memaksimalkan labanya sesuai dengan karakteristik struktur pasar di mana bank beroperasi (Perry warjiyo, 2006).

Di dalam menjalankan perannya bank pemerintah berfungsi untuk menjaga sistem intermediasi dan *agent of development* (sebagai alat pembangun Negara). Berdasarkan data perbankan pemerintah dan swasta nasional yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia, diketahui bahwa ternyata kredit UMKM yang disalurkan perbankan swasta nasional memiliki porsi yang lebih besar dibanding kelompok bank pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi bank pemerintah sebagai lembaga intermediasi dan *agent of development* tidak berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

Menurut Agung et.al (2001), Gosh and Gosh (1999), dan Siregar (2003), krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1997 disebabkan dari sisi penawaran ,atau lebih spesifiknya disebabkan oleh sektor perbankan (*fenomena credit crunch*) . Membaiknya kondisi sektor perbankan ditunjukkan oleh spread tingkat suku bunga yang meningkat, penurunan rasio kredit yang bermasalah (NPL), serta rasio kecukupan modal (CAR) yang semakin meningkat . Dengan adanya indikator tersebut maka penyaluran kembali kredit ke masyarakat juga akan membaik. Namun, kondisi seperti ini tidak langsung dapat dirasakan dan berlaku pada sektor UMKM. Hal ini dikarenakan sektor riil/UMKM memerlukan tenggang waktu atau *lag* untuk dapat melihat dampak dan perkembangan dari suatu aspek kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku perbankan dari sisi internal perbankan yaitu spread suku bunga, CAR dan NPL di dalam

menyalurkan kreditnya ke sektor UMKM pada dua kelompok bank, yaitu kelompok bank pemerintah dan swasta nasional. Dengan menggunakan pendekatan keuntungan maksimal (*Profit Maximization*) dalam pengalokasian aset bank, maka variabel yang dianggap berpengaruh terhadap penyaluran kredit ke sektor UMKM adalah spread tingkat suku bunga perbankan, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan NPL (*Non Performing Loan*) di dalam penyaluran KUK. Dikarenakan motif penyaluran kredit antara bank pemerintah dengan bank swasta nasional berbeda. Bank pemerintah di dalam menyalurkan kredit tetap memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan *agent of development*, sedangkan bank swasta nasional semata-mata hanya berdasarkan motif keuntungan. Oleh karena itu, analisis pada penelitian ini juga dilakukan secara terpisah terhadap kedua kelompok bank.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh spread tingkat suku bunga kredit dan simpanan kelompok bank pemerintah, CAR(*Capital Adequacy Ratio*), dan NPL(*Non Performing Loan*) terhadap volume kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok bank pemerintah.
2. Bagaimanakah pengaruh spread tingkat suku bunga kredit dan simpanan kelompok bank swasta nasional, CAR(*Capital Adequacy Ratio*), dan NPL(*Non Performing Loan*) terhadap volume kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok bank swasta nasional.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Menganalisis pengaruh spread tingkat suku bunga kredit dan simpanan kelompok bank pemerintah, *CAR(Capital Adequacy Ratio)*, dan *NPL(Non Performing Loan)* terhadap volume kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok bank pemerintah.
2. Menganalisis pengaruh spread tingkat suku bunga kredit dan simpanan kelompok bank swasta nasional, *CAR(Capital Adequacy Ratio)*, dan *NPL(Non Performing Loan)* terhadap volume kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok bank swasta nasional.

Kegunaan Penelitian :

1. **Bagi penulis**, penelitian ini berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian serta menganalisis masalah sesuai dengan teori-teori dan ilmu yang didapatkan penulis selama proses perkuliahan.
2. **Bagi Masyarakat**, Sebagai pengetahuan bagaimana perilaku perbankan dalam menyalurkan dana kreditnya, khususnya kredit sektor UMKM.
3. **Bagi pemerintah**, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai sumber informasi mengenai perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM, serta dapat menambah khasanah bagi penelitian selanjutnya

1.3 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Memuat rumusan masalah , tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas teori-teori yang melandasi penelitian, antara lain : Keseimbangan di pasar uang, Teori Uang, Kuantitas Uang Tingkat bunga, Mekanisme kebijakan Moneter, Perbankan, Sumber dan Alokasi dana bank, Kredit, *Spread* tingkat bunga, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), Model *Profit maximization*, Kredit UMKM.

Bab III Metode Penelitian

Terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan deskripsi dari obyek penelitian khususnya mengenai variabel-variabel yang digunakan. Selain itu memuat analisis data yang memuat intepretasi data agar lebih mudah dimengerti. Pembahasan berisi jawaban atau permasalahan penelitian.

Bab V Simpulan dan Penutup

Memuat ringkasan atas hasil pembahasan dan saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter untuk mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan (Perry Warjiyo, 2004).

2.1.2 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan moneter, terutama berkaitan dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jika kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya kembali (tindakan stabilisasi). Pada dasarnya instrumen atau alat kebijakan yang dipakai adalah sebagai berikut (Nopirin, 2000) :

a. Politik Pasar Terbuka (*open market policy*)

Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini akan berpengaruh : pertama, menaikkan cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menambah cadangan bank umum

dengan menjual surat berharga yang ada pada bank sentral. Akibat tambahan cadangan, maka bank umum dapat menambah jumlah uang beredar (melalui proses penciptaan kredit). Kedua, tindakan pembelian / penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga (dengan demikian juga tingkat bunga) surat berharga. Akibatnya, tingkat bunga umum juga akan terpengaruh.

b. Politik Diskonto (*discount policy*)

Tindakan untuk mengubah-ubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal ini meminjam dana dari bank sentral. Dengan menaikkan diskonto, maka ongkos meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank untuk meminjam. Sehingga, jumlah uang yang beredar dapat ditekan/dikurangi. Di negara yang sudah maju, politik diskonto juga mempunyai efek pengumuman (*announcement effect*), yakni efek yang ditimbulkan dari adanya pengumuman (melalui media massa) tentang tingkat diskonto. Pengumuman ini akan dipakai oleh masyarakat sebagai indikasi ketat tidaknya kebijakan moneter pemerintah.

c. Politik Perubahan Cadangan Minimum (*reserves requirements*)

Perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan, jumlah uang beredar cenderung naik, dan sebaliknya jika dinaikkan jumlah uang akan cenderung turun.

d. Margin Requirement

Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan pembelian surat berharga (biasanya bersifat spekulatif). Caranya, dengan menetapkan jumlah minimum kas *down payment* untuk transaksi surat berharga. Misalnya, ditentukan margin requirement 80 persen. Artinya apabila seseorang hendak membeli surat berharga maka 80 persen harus dibayar dengan kas dan baru sisanya (20 persen) boleh dipinjam dari bank.

2.1.3 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter pada mulanya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh *Quantity Theory of Money* (Perry Warjiyo, 2004). Dalam perkembangan lanjutan, dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat lima saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter (*monetary policy transmission channels*) yang sering dikemukakan oleh Mishkin,1996; Bank for International Settlement,1997 ; Kakes,2000; De Bondt,2000 dan Bofinger,2001 (Perry Warjiyo, 2004) :

1. Saluran Uang

Menurut Irving Fisher (Perry Warjiyo, 2004) , saluran ini mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian , yang pertama kali dijelaskan oleh *Quantity Theory of Money*. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan

uang beredar dengan inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai “ *The Equation of Exchange* ” :

$$MV = PT$$

Dimana jumlah uang beredar (M) dikalikan dengan tingkat perputaran uang atau *income velocity* (V) sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi / output riil (T) dikalikan dengan tingkat bunga (P). Dengan kata lain , dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi (MV) sama dengan output nominal, dihitung dengan harga yang berlaku, yang ditransaksikan dalam ekonomi (PT).

Mekanisme transmisi moneter melalui saluran uang merupakan konsekuensi langsung dari proses perputaran uang dalam perekonomian. Dengan demikian, mekanisme transmisi moneter ini dimulai dengan tindakan bank sentral mengendalikan uang primer atau base money (B) sesuai dengan sasaran akhir yang ingin dicapai. Kemudian uang primer ini , dengan proses money multiplier, ditransmisikan ke jumlah uang beredar ($M1, M2$) sesuai dengan permintaan masyarakat. Pada akhirnya uang beredar akan memengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, khususnya inflasi dan output riil karena peranannya untuk pemenuhan kebutuhan transaksi ekonomi oleh para pelaku ekonomi.

2. Saluran Kredit

Mekanisme saluran ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi riil adalah kredit perbankan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar. Saluran kredit lebih menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan karena adanya *assymetric information* atau sebab-sebab lain.

Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis saluran kredit yang akan memengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor riil , yaitu saluran kredit bank (*bank leading channel*) dan saluran neraca perusahaan (*firms balance sheet channel*). Saluran kredit lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab-sebab lain. Di sisi lain, saluran neraca perusahaan lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh pada penyaluran kredit, khususnya kondisi *leverage* perusahaan.

3. Saluran Suku Bunga

Saluran ini lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output riil. Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam proses perputaran uang, mekanisme transmisi ini dapat terangkan sebagai berikut :

- Tahap Pertama, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek (misalnya suku bunga SBI dan PUAB) di pasar uang rupiah. Perkembangan selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada para debiturnya. Proses ini biasanya tidak berlangsung secara segera, namun terdapat tenggang waktu.
- Tahap Kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor riil akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga terhadap permintaan konsumsi terjadi

terutama karena suku bunga deposito merupakan komponen dari pendapatan masyarakat (*income effect*) dan bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi (*substitution effect*).

4. Saluran Nilai Tukar

Saluran ini menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi satu negara dengan negara lain.

5. Saluran Harga Aset

Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan harga aset tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap perkembangan harga aset yang selanjutnya akan berdampak pada berbagai aktivitas di sektor riil. Mekanisme transmisi melalui saluran harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor, baik karena perubahan kekayaan yang dimiliki (*wealth effect*) maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi (*disposable income*) yang timbul dari penerimaan hasil

penanaman aset finansial dan aset fisik tersebut (*substitution and income effect*). Selain itu, pengaruh harga aset terhadap sektor riil juga terjadi pada permintaan investasi oleh perusahaan.

6. Saluran Ekspektasi

Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi (*expectation channel*) semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Para pelaku ekonomi, dalam menentukan tindakan bisnisnya, akan berdasarkan oada prospek ekonomi dan keuangan ke depan. Mereka akan membentuk persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbgai indicator ekonomi dan keuangan ke depan. Di sektor keuangan, kebijakan moneter bank sentral akan memengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek (misalnya SBI dan PUAB), yang selanjutnya melalui transmisi saluran suku bunga akan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan (deposito dan kredit) serta melalui transmisi saluran nilai tukar akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar. Pada tahap selanjutnya, ekspektasi inflasi yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas di sektor riil. Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan agregat terjadi karena dampaknya terhadap tingkat suku bunga riil yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya permintaan konsumsi dan investasi di masyarakat.

2.1.4 Tenggang Waktu (*lag*) dalam Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter untuk tujuan stabilisasi ekonomi tergantung pada pertama, kuat tidaknya hubungan antara perubahan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi dan yang kedua, jangka waktu antara perubahan kebijakan moneter dengan efeknya terhadap kegiatan ekonomi. Jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan perubahan kegiatan ekonomi sering disebut tenggang waktu/*lag* (Nopirin, 2000).

Menurut Boediono (1994) dinyatakan bahwa terdapat dua macam lag yang dikenal dalam kepustakaan kebijakan ekonomi, yaitu (a) *inside lag* dan (b) *outside lag* .

- *Inside lag* : jarak waktu dan timbulnya permasalahan di dalam perekonomian sampai dengan dimulainya tindakan kebijakan untuk mengatasinya. *Inside lag* ini sebenarnya terdiri dari 3 macam lag yang berurutan. Pertama adalah jarak waktu mulai dari timbulnya masalah sampai dengan para pembuat kebijakan menyadari bahwa memang ada masalah (*Recognition Lag*). Kedua adalah jarak waktu antara saat disadarinya bahwa ada masalah dan saat diputuskannya suatu tindakan (*Decision Lag*). Ketiga adalah jarak waktu antara saat keputusan kebijakan diambil dan saat keputusan tersebut mulai dilaksanakan (*Action Lag*). *Inside lag* sangat tergantung pada kecepatan kerja atau efisien dari lembaga pembuat kebijakan.

- *Outside Lag* adalah jarak waktu antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian.

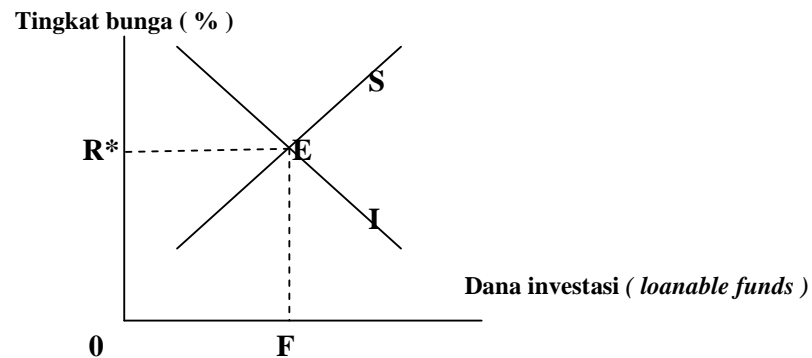
2.1.5 Tingkat Bunga

Bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat bunga sebagai harga bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah saat ini dengan satu rupiah di masa depan (Boediono, 1994). Pertukaran inilah yang menimbulkan fenomena “hutang-piutang”.

2.1.5.1 Teori *Loanable Funds*

Bunga adalah harga dari *loanable funds*, *Loanable funds* adalah dana yang tersedia untuk dipinjamkan, atau disebut juga dana investasi. Penawaran dana investasi ini dibentuk oleh jumlah simpanan atau tabungan masyarakat yang kelebihan dana. Di lain pihak, permintaan dana investasi dibentuk oleh jumlah kebutuhan akan dana masa sekarang dari orang yang membutuhkan dana (investor). Kedua kelompok tersebut bertemu di pasar dana investasi dan menyepakati tingkat bunga keseimbangan. Keterangan tersebut dapat diperjelas dengan melihat Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Keseimbangan Pasar Dana Investasi
(loanable funds)



Sumber : Boediono, 1994

Permintaan dan penawaran dana investasi bertemu di titik E dan membentuk R^* sebagai tingkat bunga keseimbangan dan F sebagai jumlah dana investasi keseimbangan.

Besarnya dana investasi yang ditawarkan ditentukan oleh *rate of time preference*, atau premi yang harus dibayarkan kepada pemilik dana agar mau meminjamkan dananya. Besarnya dana investasi yang diminta ditentukan dari nilai *marginal product of capital*, atau harapan akan tingkat produktivitas modal marjinal (Boediono, 1994).

2.1.5.2 Teori *Liquidity Preference*

Keynes membagi motif memegang uang menjadi motif transaksi , motif berjaga-jaga , dan spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya “permintaan akan uang” yang diberi nama *liquidity preference*. Nama ini mempunyai makna tertentu, yakni bahwa permintaan akan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan

dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. Memegang uang tunai menjamin likuiditas pada orang tersebut. Preferensi inilah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan uang. Dengan motif-motif tersebut, maka setiap individu menginginkan uangnya dalam bentuk likuid. Keinginan atau preferensi untuk tetap likuid itulah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan uang. Keynes lebih menekankan motif memegang uang untuk tujuan spekulasi (Boediono, 1994).

2.1.5.3 Tingkat Bunga Murni, Premi Risiko, dan Biaya Transaksi

Tingkat Bunga Murni merupakan tingkat bunga yang terbentuk tanpa memperhitungkan faktor risiko tidak kembalinya dana yang dipinjam oleh debitur (modal ditambah bunga). Faktor risiko bisa diperhitungkan dengan meminta jaminan (*collateral*) atau menetapkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Tambahan atau kenaikan tingkat bunga ini disebut premi risiko. Dalam memberikan pinjaman melalui transaksi keuangan, pihak kreditur (pemberi pinjaman) harus memperhitungkan juga biaya transaksi. Biaya transaksi antara lain terdiri dari biaya menyimpan dan merawat jaminan, biaya administrasi cicilan hutang, biaya administrasi cicilan hutang, biaya penagihan dan sebagainya (Boediono, 1994).

2.1.5.4 Tingkat Bunga Nominal

Tingkat bunga nominal merupakan tingkat bunga yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Tingkat bunga inilah yang harus dibayar debitur kepada kreditur disamping pengembalian pinjaman pokoknya pada saat jatuh tempo.

Tingkat bunga ini sebenarnya adalah penjumlahan dari unsur-unsur tingkat bunga (Boediono, 1994), yaitu :

$$R^*n = R^*m + R^*p + R_t + R^*i$$

keterangan :

R^*n = tingkat bunga nominal

R^*m = tingkat bunga murni

R^*p = premi risiko

R_t = biaya transaksi

R^*i = premi inflasi

2.1.5.5 Tingkat Bunga Riil

Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal *minus* laju inflasi yang terjadi selama periode yang sama (Boediono, 1994) :

$$R_r = R^*n - R^{**i}$$

keterangan : R_r = tingkat bunga riil

R^*n = tingkat bunga nominal

R^{**i} = laju inflasi

R^*n adalah simbol untuk laju inflasi yang *benar-benar terjadi* selama periode tersebut. Sedangkan R^{**i} adalah untuk laju inflasi yang *diharapkan* terjadi selama periode yang sama dan laju inflasi yang diharapkan ini menambah tingkat bunga sebagai unsur “premi inflasi”.

2.1.5.6 Spread

Spread atau *net-margin* adalah pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya spread ini bervariasi, tergantung dari besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Besarnya volume

kredit yang disalurkan bank akan berpengaruh terhadap margin (selisih) antara tingkat bunga pinjaman (*cost of funds*) dan tingkat bunga simpanan (*lending Rate*).

Semakin tinggi spread atau net interest margin yang mampu diciptakan oleh bank, maka hal ini mengindikasikan tingkat keuntungan bank meningkat sehingga akan memberikan kesempatan bagi bank untuk lebih leluasa dalam menyalurkan dana kreditnya, terutama untuk melayani sektor UMKM.

Penentuan tinggi rendahnya spread tergantung pada bagaimana bank menerapkan strategi serta target pasarnya dan risiko perbankan. Pengelompokan jenis industri dan peringkat usaha bank merupakan pertimbangan untuk menetapkan tinggi rendahnya spread (Dendawijaya, 2003)

Pada saat krisis pertengahan 1997, kebijakan meningkatkan tingkat bunga (SBI) bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar dan mengendalikan jumlah uang beredar . Mekanismenya dengan meningkatkan tingkat bunga SBI sebagai suku bunga acuan perbankan akan direspon dengan meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman. Hal ini berdampak pada penurunan penyaluran kredit dan jumlah uang beredar ke masyarakat (Johnston dalam Siregar, 2001)

Spread ini memengaruhi perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan tingkat suku bunga SBI yang tinggi maka perbankan akan mengalami kesulitan di dalam menetapkan suku bunga pinjaman. Oleh sebab itu, perbankan harus tetap menjaga selisih/ margin antara kedua tingkat bunga tersebut.

2.1.6 Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Berikut adalah jenis-jenis kredit berdasarkan penggunaan :

- Berdasarkan penggunaan dana oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi (Abidan Tuah, 2007) :

1. Kredit Modal Kerja

Kredit ini digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Jangka waktu kredit ini pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal nasabah. Apabila ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri dari :

- *KMK-Revolving*

Kredit ini diberikan kepada debitur yang usahanya dapat diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan bank cukup percaya atas kemampuan serta kemauan nasabah. *KMK-Revolving* merupakan fasilitas KMK yang dapat diperpanjang tanpa debitur perlu untuk mengajukan permohonan kredit baru pada awal periode.

- *KMK-Einmaleg*

Kredit ini diberikan jika kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dan pihak bank kurang percaya akan kemampuan debitur, maka bank akan lebih aman dalam memberikan KMK-Einmaleg. KMK ini hanya terbatas untuk satu periode (satu kali perputaran usaha nasabah), sehingga apabila nasabah berencana memperpanjang pinjaman harus mengajukan permohonan kredit baru. KMK ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang kegiatan usahanya tergantung tersedia atau tidaknya suatu proyek yang diperoleh.

2. Kredit Investasi

Kredit ini digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang para nasabah. Kredit investasi berjangka waktu panjang atau menengah. Nilai kredit ini relatif besar dan pelunasanya dilakukan melalui angsuran.

3. Kredit Konsumsi

Kredit jenis ini digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk konsumsi dan bukan untuk barang modal . Kredit ini juga sering disebut Kredit Multiguna karena bisa digunakan untuk berbagai tujuan.

Dalam Penelitian ini, jenis kredit yang menjadi objek adalah kredit modal kerja. Jenis Kredit inilah yang berpengaruh terhadap perkembangan sektor UMKM.

- Manajemen Perkreditan

Penyaluran kredit adalah merupakan salah satu aktivitas utama bagi perbankan. Apabila diperhatikan pada neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit yang diberikan. Demikian juga apabila diamati dari sisi pendapatan bank, akan terlihat bahwa pendapatan terbesar bank adalah pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi dan pengawasan kredit. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya (Y, Sri Susilo,et, al dalam Soedarto, 2004).

Sebelum kredit disalurkan atau diberikan kepada peminjam, pihak kreditur akan mengevaluasi calon peminjam dari berbagai hal, meliputi proyek atau usaha yang dibiayai, bagaimana dan siapa calon peminjam. Dalam dunia perbankan dikenal beberapa cara penilaian kredit (analisis kredit) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang pada akhirnya akan memengaruhi sehat atau tidaknya perkreditan suatu bank. Dalam penilaian kredit, disamping syarat-syarat kredit dari segi yuridis, dikenal pula pedoman “3R” yaitu (Sinungan dalam Soedarto, 2004) :

a. Return

Return menunjukkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari penggunaan kredit tersebut.

b. Repayment Capacity

Repayment Capacity menunjukkan kemampuan pemohon kredit untuk mengembalikan pinjamannya pada saat kredit tersebut harus sudah diangsur atau dilunasi.

c. Risk bearing Ability

Risk bearing Ability menunjukkan kemampuan suatu proyek atau usaha yang dibiayai apabila menghadapi risiko kegagalan yang akan mengakibatkan macetnya pengembalian kredit.

Disamping itu, dalam usahanya sedini mungkin bank melakukan antisipasi dalam menghadapi debitur yang kurang bertanggung jawab. Sebelum menyetujui pemberian kredit bank akan menilai calon debiturnya dengan menggunakan *The Five C's of credit Analysis*, yaitu (Soedarto, 2004) :

a. Character

Character menunjukkan kepribadian, moral dan kejujuran calon debitur. Manfaat penilaian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik dari calon debitur di dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usahanya yang dibiayai dengan kredit dari bank.

b. Kondisi (*Condition*)

Kondisi (*Condition*) menunjukkan kemampuan calon debitur di dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usahanya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.

c. Modal (*Capital*)

Capital menunjukkan kemampuan permodalan, semakin besar komposisi modal menunjukkan risiko finansial yang semakin kecil

d. Agunan atau Jaminan (*Collateral*)

Agunan atau Jaminan (*Collateral*) menunjukkan barang-barang jaminan yang dapat diberikan oleh calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.

e. Kondisi (*Condition*)

Kondisi (*Condition*) menunjukkan keadaan ekonomi pada umumnya, baik nasional maupun internasional dan keadaan ekonomi calon debitur, yaitu kedudukan usahanya sehubungan dengan pemasaran hasil produksinya di dalam/luar negeri

Analisis kredit dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan risiko yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan kreditnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka kegiatan operasi bank akan terganggu dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan yang dampaknya akan dirasakan orang banyak serta mengganggu aktivitas perekonomian perbankan. (Soedarto, 2004).

Berikut beberapa risiko yang perlu di perhatikan dalam penyaluran kredit UMKM oleh perbankan :

- **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti pembiayaan, *treasury*, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank.

Menurut Joel Bessis dalam Abidan Tuah (2007) Manajemen risiko kredit mencakup :

Risiko proses putusan kredit, sebelum putusan dibuat sampai menindak lanjuti komitmen kredit, ditambah risiko pemantauan dan proses laporan. Selanjutnya diperlukan pengukuran dari risiko kredit, antara lain menggunakan : *Limit systems and credit screening*, *risk quality*, serta *credit enchanment*. Sedangkan menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia), dinyatakan bahwa proses manajemen risiko bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, sistem informasi manajemen dan pelaporanya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen. Bank perlu melakukan manajemen terhadap risiko kredit yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas risiko yang timbul.

- **Risiko Pasar**

Risiko pasar yakni risiko yang terjadi akibat berubahnya variabel dari portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel yang berubah biasanya adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang. Risiko pasar bersumber dari kegiatan investasi

bank dalam bentuk surat berharga dan pengadaan valas atau penempatan pada lembaga keuangan lainnya.

Risiko pasar dikelola dalam batas risiko secara menyeluruh dan menggunakan teknik lindung nilai (*hedging*). Seluruh aktivitas perdagangan sehubungan pada pertukaran mata uang asing, derivatif, pasar uang dan surat-surat berharga diawasi setiap hari dan dikaji dengan basis *mark to market* sesuai batas yang ditetapkan oleh Komite Risiko Pasar dan sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Risiko Pasar sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia : 9/13/PBI/2007 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara menyeluruh dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Beberapa faktor standar risiko pasar mencakup :

- a. Risiko Modal, adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan (investasi pemilik) secara terbatas yang merupakan selisih aktiva dan kewajiban.
- b. Risiko suku Bunga, adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Secara umum, jika suku bunga meningkat maka harga obligasi berbunga akan turun, demikian juga sebaliknya. Risiko suku bunga umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi, teknik yang biasa digunakan untuk mengelola risiko suku bunga.

c. Risiko Mata Uang, risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Suatu perusahaan atau pemodal yang memiliki aktiva atau operasi bisnis lintas negara akan memperoleh risiko ini jika tidak menerapkan lindung nilai (*hedging*). Risiko nilai tukar yang terkait dengan instrumen mata uang asing penting diperhatikan dalam investasi asing. Risiko ini disebabkan karena adanya perbedaan perbankan. Apabila hal ini semakin memperburuk kondisi perbankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan akan semakin menurun. Masyarakat (nasabah) yang menyimpan uang di bank mulai tidak yakin akan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara penuh, sehingga semakin banyak nasabah yang menarik uangnya dari bank. Krisis Kepercayaan yang diikuti oleh penarikan dana secara besar-besaran dari bank oleh nasabah ini disebut *bank runs*. Berikut beberapa teori tentang penyebab dan dampak terjadinya *bank runs* (Statistik Perbankan Indonesia, 2002) :

a. Moral Hazard dan penurunan aset

Dalam teori ini diasumsikan bahwa banyak bank yang memperoleh fasilitas berupa kemudahan mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang aman dari pemerintah, sehingga terjadi persaingan dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengakibatkan kinerja dari bank seolah-olah sangat sehat dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. Penurunan nilai aset terjadi jika pemerintah tidak lagi

memberikan jaminan pada pinjaman bank, sehingga mengubah ekspektasi investor karena mereka merasa dananya tidak lagi aman. Bank runs terjadi pada saat ketidakpercayaan investor atau nasabah diwujudkan dengan menarik dana mereka dalam jumlah besar.

b. Disintermediasi dan Likuidasi

Diasumsikan bahwa pihak bank adalah pihak yang baik, sehingga penyebab terjadinya krisis dan aset *declation* adalah panik finansial (*bank runs*) yang tidak diikuti oleh kebijakan yang tepat. Pihak bank melakukan investasi utamanya untuk jangka panjang, sehingga membutuhkan pembiayaan dana yang bersifat jangka panjang. Keadaan ini menyebabkan bank mudah terserang panik finansial.

c. *No Contagion Effect*

Berdasarkan teori *No Contagion Effect*, bank runs tidak akan merubah volume deposito dalam pengertian bahwa nasabah yang tidak percaya kepada suatu bank tidak akan memindahkan dananya kepada bank lain, sehingga total simpanan dalam sistem perbankan akan tetap jumlahnya. Sebaliknya, koalisi antar bank (di mana bank yang mengalami *excess liquidity* mengalirkan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas nyata, yang akan mengakibatkan perbedaan laju inflasi.

d. *Contagion Effect*

Ketidakpercayaan pada suatu bank juga akan membawa ketidakpercayaan kepada sistem perbankan secara keseluruhan. Contagion

effect bank runs suatu bank terjadi jika nasabah menarik dananya dari bank yang gagal dan yang masih baik dalam waktu yang sama tanpa adanya proses pemindahan deposito. Contagion effect dapat ditentukan dengan membandingkan uang kartal terhadap simpanan dana pihak ketiga (DPK) dalam sistem perbankan(C/D).

Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting bagi sistem perekonomian di Indonesia, bank dituntut agar mampu mengelola berbagai risiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan. Jika tidak, risiko ini akan memberikan efek buruk bagi masyarakat. Tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan menentukan eksistensi dari lembaga keuangan (bank) yang akhirnya akan berpengaruh pada kelancaran aliran dana di dalam sistem perekonomian Indonesia.

- **Kredit Usaha UMKM**

Bank pada dasarnya adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang keuangan dengan menyalurkan dana berlebih dan mengalokasinya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana (*intermediary*) dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk kredit. Kredit Usaha Kecil Menurut paket kebijakan 29 Mei 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993 adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp.250 juta untuk membiayai Kredit Modal Kerja. Pada dasarnya, kebijakan pembentukan fasilitas KUK dari perbankan adalah kebijakan yang diterapkan oleh otoritas moneter maupun otoritas fiskal untuk mengembangkan usaha kecil (Abidan Tuah, 2007).

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM :

1. usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus k=juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mauoun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, kriteria usaha yang memiliki kekayaan bersih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 lima ratus milyar rupiah).

Batas minimum KUK yang harus diberikan oleh bank sekurang-kurangnya adalah sebesar 20 persen dari total kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Namun, sejak April 1997 alokasi yang harus diberikan adalah 22,5 persen atau 25 persen dari ekspansi kredit netto (Perry Warjiyo, 2006). Secara umum, otoritas moneter maupun fiskal berpendapat bahwa perbankan cenderung untuk tidak memberikan fasilitas kredit kepada usaha kecil, karena perbankan diasumsikan berpendapat bahwa pemberian kredit kepada UMKM mengandung risiko yang relatif lebih besar. Ketentuan batas minimum penyaluran kredit MKM tersebut berlaku bagi semua bank, kecuali bagi kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank campuran yang telah memilih untuk memenuhi kewajiban pemberian kredit ekspor sebesar 50% dari kreditnya (Y.Sri Susilo, et al, 2000)

2.1.7 Perbankan

Bank adalah suatu lembaga yang kegiatan utamanya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Muchdarsyah Sinungan, 2000). Menurut kamus Bank Indonesia, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terdapat tiga cara yang ditempuh bank untuk menciptakan uang giral , yaitu:

1. Substitusi, yaitu dengan mengganti simpanan uang kartal masyarakat di bank menjadi uang giral dengan menggunakan cek atau media lainnya.
2. *Exchange of Claim*, dengan membuka rekening giro atau rekening khusus lainnya atas kredit yang diminta masyarakat melalui pemberian buku cek. Sehingga kredit tidak diberikan dalam bentuk uang kartal, melainkan dalam bentuk uang giral. Hal inilah yang menyebabkan munculnya istilah “bertambah kredit berarti bertambah uang “.
3. Transformasi, dengan menguangkan utang pihak ketiga baik swasta maupun pemerintah. Sebagai contoh, membeli surat berharga nasabah dan membayarnya kembali tidak dengan uang kartal, namun dengan uang giral.

Fungsi utama bank adalah sebagai *financial intermediary*, yaitu intermediasor dana-dana masyarakat yang berlebih pada saat ini dan dengan kemampuan yang dimilikinya mampu mengalokasikan dana-dana tersebut kepada

agen-agen ekonomi yang membutuhkan. Hal inilah yang kemudian tercipta proses alokasi sumber daya modal yang efisien. Menurut Mishkin dalam Abidan Tuah (2007) fungsi bank sebagai *financial intermediary* adalah :

Dapat mereduksi biaya transaksi keuangan, intermediator memiliki kemampuan berupa ahli-ahli yang terampil serta berkompeten. Intermediator ini memiliki skala ekonomis dalam ruang lingkup usahanya. Dengan biaya transaksi yang rendah di dalam menyediakan layanan likuiditas, maka tiap-tiap nasabah bank akan lebih mudah untuk melakukan transaksi keuangan.

- *Risk Sharing*, dengan menyerap dana berlebih dari masyarakat, kemudian bank memberikan kepercayaan kepada calon nasabah hal ini dapat membantu mengurangi risiko dalam memegang uang yang likuid.

- **Manajemen Dana Bank**

Manajemen dana bank dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan penghimpunan dana masyarakat ke dalam bank dan mengalokasikan dana-dana tersebut untuk kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui pergerakan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai batas ketentuan yang berlaku (Muchdarsyah Sinungan, 2000).

- **Sumber Dana Bank**

Sumber dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari (Muchdarsyah Sinungan, 2000) :

- modal sendiri (Dana Pihak Pertama). Berasal dari para pemegahan bank atau pemilik bank. Pinjaman ini biasa dilakukan jika ada keadaan mendesak yang membutuhkan dana likuid. Jangka waktunya relatif pendek, mulai dari satu malam (*overnight call money*) hingga satu bulan.
- Dana pinjaman dari pihak luar (Dana Pihak Kedua) terdiri dari :
 - Pinjaman dari bank-bank lain (*call money*) , yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasa dilakukan bila ada keadaan mendesak yang membutuhkan dana likuid . Jangka waktunya relatif pendek , mulai satu malam (*overnight call money*) hingga satu bulan.
 - Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain yang berasal dari luar negeri. Biasanya berbentuk pinjaman dalam jangka waktu menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melewati persetujuan dari bank sentral demi menjaga solvabilitas bank yang bersangkutan.
 - Pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Bentuk pinjaman ini biasanya tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit , tetapi pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo.
 - Pinjaman dari Bank Sentral, diberikan oleh bank sentral dengan sifat pinjaman yang lunak (jangka waktu panjang dan bunga rendah). Tujuan pinjaman ini adalah agar bank mampu

menunjang pembiayaan investasi sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dalam pembangunan nasional.

- Dana dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga). Sumber dana yang paling penting adalah masyarakat, oleh sebab itu bank harus berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Bentuk sumber dana masyarakat di bank adalah giro (*demand deposit*), Deposito (*time deposito*) dan Tabungan (*saving*).

2.1.8 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yakni kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau secara matematis dapat dituliskan :

$$CAR = \text{Modal} / \text{ATMR} \times 100 \%$$

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0 persen dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup (Y. Sri Susilo, et.al, 2004)

Tingkat kecukupan modal bank diukur berdasarkan perhitungan capital adequacy. Perhitungan adequacy ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman modal yang mengandung risiko harus menyediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula risk marginya, yang berarti semakin banyak modal yang harus disediakan. Suatu bank dapat diklasifikasikan sehat permodalanya apabila bank tersebut dapat memelihara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sekurang-kurangnya 8 persen. Tingkat kecukupan modal bank (*Capital Adequacy Ratio*) diperoleh dengan cara membandingkan jumlah modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, permodalan bank dibedakan menjadi (Soedarto, 2004).

1. Modal Inti

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut.

a. Modal Disetor

Modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

b. Agio Saham

Selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Cadangan Umum

Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.

d. Cadangan Tujuan

Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

e. Laba Ditahan

Saldo bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham/rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

f. Laba Tahun Lalu

Laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham/rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 persen. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

g. Laba Tahun Berjalan

Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank

mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- h. Bagian Kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal pelengkap

Modal Pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, terdiri dari :

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan penghapusan Aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

c. Modal Kuasi

Modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.

d. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti pinjaman tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun, dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus lurus atas persetujuan Bank Indonesia.

2.1.9 *Non Performing Loan (NPL)*

Kredit non lancar (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang kolektibilitasnya sudah dikategorikan kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Non Performing Loan (NPL) merupakan persentase kredit bermasalah (dengan criteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). NPL dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat factor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun factor ketidaksengajaan yang berasal dari factor luar (Meydianawathi, 2006). Rasio NPL dapat diformulasilasikan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \text{Kredit Bermasalah} / \text{Total Kredit} \times 100\%$$

Kredit digolongkan non lancar, apabila terdapat tunggakan pokok kredit maupun bunga. Hal ini disebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok atau membayar bunga sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati antara bank dengan debitur. Tunggakan pokok kredit maupun bunga menyebabkan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit menjadi terpengaruh karena berkurangnya dana yang akan disalurkan untuk kredit. Di sisi lain, bank harus membentuk penyesihan cadangan piutang ragu-ragu untuk menutup risiko kerugian. Dengan demikian, ada korelasi negatif antara jumlah kredit non lancar dengan jumlah kredit UMKM yang disalurkan (Soedarto, 2004).

2.1.10 Profit Maximization

Dalam perekonomian, setiap agen-agen ekonomi akan memaksimalkan keuntungannya. Keuntungan adalah selisih antara nilai penjualan barang yang perusahaan jual dengan biaya yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang tersebut. Apabila dirumuskan, fungsi keuntungan maksimal adalah (Abidan Tuah, 2007) :

$$\max \pi = TR (Q) - TC (Q)$$

$$\text{di mana } TR = P.Q \text{ dan } TC = FC + VC$$

Di dalam penelitian ini diasumsikan bahwa industri perbankan memiliki struktur pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan, setiap perusahaan yang ada adalah sebagai price-taker. Bank-bank tidak dapat memengaruhi harga (dalam hal ini adalah suku bunga) yang terbentuk di pasar. Apabila bank menetapkan tingkat bunganya di bawah atau di atas harga pasar, maka keuntungan yang diperoleh tidak akan maksimal.

Dalam pasar persaingan, ada dua kondisi yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan yang maksimal :

- Harga (P) = Biaya Marjinal (MR)
- Biaya Marjinal (MC) harus menaik.

Dalam memaksimalkan keuntungannya, bank harus mengamati secara menyeluruh pendapatan (*return*) yang tertinggi yang dapat dihasilkan dari kredit dan sekuritas, meminimalisir risiko, dan membuat komposisi likuiditas yang tepat dengan menjaga aset tetap likuid. Tujuan-tujuan tersebut antara lain dilakukan dengan cara (Miskhin dalam Abidan Tuah, 2007) :

- Mencari peminjam yang akan membayar tingkat bunga tertinggi dan tidak memiliki kecenderungan untuk gagal membayar pinjaman.
- Mencari sekuritas yang memberi return tinggi dengan risiko yang rendah
- Dalam mengatur aset-asetnya, bank harus menekan risiko dengan diversifikasi, yaitu dengan membeli bermacam-macam aset dan menyetujui jenis pinjaman yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan agar risiko yang nantinya terjadi berefek tersebar (*risk spreading*).
- Mengatur aset-aset likuidnya sehingga dalam pemenuhan cadangan primer (*reserve*) tidak menderita biaya yang besar.

Perbankan dalam menjaga tingkat keuntungannya agar tetap mencukupi memiliki dua alternatif (Miskhin dalam Abidan Tuah, 2007) :

- Merperluas cakupan kredit ke area-area baru dan lebih berisiko.
- Mengejar keuntungan dari aktivitas non neraca (*off-balance-sheet*), yaitu keuntungan bukan dari bunga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Abidan Tuah (2007) dengan judul penelitian “ Analisis Pengaruh Spread Tingkat suku bunga perbankan, SBI, Dana Pihak Ketiga, dan Kebijakan Alokasi KUK terhadap penyaluran KUK oleh Perbankan “. Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat suku bunga (dalam penelitian ini adalah selisih tingkat suku bunga kredit dengan deposito), SBI, dana pihak ketiga, kebijakan alokasi kredit KUK dan kondisi moneter terhadap proporsi KUK atas total kredit perbankan. Penelitian ini dilakukan atas dua kelompok bank, yaitu bank persero dan swasta nasional. Periode penelitian ini dimulai dari bulan Januari 1994-Desember 2006. Pendekatan model penelitian yang dipakai adalah ECM (*Error Correction Model*) Enger-Granger dengan formula :

$$PL_t^S = \alpha_0 + \alpha_1 RCD_t + \alpha_2 SBI_t + \alpha_3 DP_t + \alpha_4 GG + \alpha_5 KRS + \varepsilon_t \dots \dots \dots (1)$$

Di mana variabel PL_t^S adalah persentase volume KUK terhadap total volume kredit bank. ($rC-rD$) menggambarkan spread tingkat bunga perbankan pada waktu t atas kelompok bank i (dalam hasil analisis menjadi RCD_i) . Variabel SBI menggambarkan tingkat bunga SBI. Variabel DP adalah posisi Dana Pihak Ketiga kelompok bank i periode t . Variabel GG dan KRS adalah variabel boneka (*dummy*) kebijakan alokasi kredit usaha kecil dan kondisi krisis moneter.

Hasil analisis maksimisasi profit jangka panjang menunjukkan seluruh variabel adalah signifikan kecuali variabel (r_C-r_D) dan DPK untuk bank persero. Hal ini terkait dengan fungsi bank persero sebagai agen pembangunan, bukan hanya mencari keuntungan. Hasil yang berlawanan dengan hipotesis ditunjukkan variabel (r_C-r_D) kelompok bank swasta, baik dalam jangka panjang maupun jangka

pendek. Hal ini terjadi karena KUK masih dinilai tidak menguntungkan dibanding jenis kredit lainnya. Pengaruh adanya kebijakan alokasi KUK memiliki pengaruh hanya dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan. Pengaruh kondisi krisis juga tidak sesuai hipotesis karena akan menurunkan penyaluran KUK pada jangka panjang. Model ini digunakan untuk melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang variabel-variabel independen.

Fransisca dan Hasan Siregar (2007) dengan judul penelitian “*Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank yang Go Public di Indonesia*”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, ROA, dan NPL. Model yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Di mana Y adalah jumlah/volume penyaluran kredit, a adalah konstanta, b_1 b_2 b_3 b_4 adalah koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. X_1 adalah DPK, X_2 adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), X_3 adalah Return on Asset (ROA), X_4 adalah Non Performing Loan (NPL) dan e adalah tingkat kesalahan pengganggu. Hasil yang diperoleh adalah DPK memiliki pengaruh positif terhadap volume kredit, CAR menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit, ROA mempunyai hubungan yang positif terhadap volume kredit dan NPL juga tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit.

Luh Gede Meydianawathi (2006) dengan judul penelitian “*Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum secara parsial dan serempak kepada sector UMKM di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui ujim t dan uji f. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$K_{INV} = \beta_0 + \beta_1 DPK_t + \beta_2 ROA_t + \beta_3 CAR_t + \beta_4 NPL_{INVt} + \mu \dots \dots \dots (1)$$

$$K_{MK} = \beta_0 + \beta_1 DPK_t + \beta_2 ROA_t + \beta_3 CAR_t + \beta_4 NPL_{MKt} + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Di mana K_{INV} adalah jumlah kredit investasi sector UMKM pada bank Umum, K_{MK} adalah jumlah kredit modal kerja sector UMKM pada bank umum, DPK_t adalah Dana Pihak Ketiga pada bank umum, CAR_t adalah *Capital Adequacy Ratio* pada bank umum, ROA_t adalah *Return on Asset* pada bank umum, NPL_{INVt} , $_{MKt}$ adalah *Non Performing Loans* untuk kredit invesatsi, kredit modal kerja pada bank umum dan U_i adalah Tingkat kesalahan atau tingkat pengganggu. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh nyata dan positif terhadap penyaluran kredit, begitu juga terhadap variabel CAR dan ROA. Sedangkan untuk variabel NPL negative dan signifikan terhadap penawaran kredit perbankan kepada sector UMKM

Reza Y.Siregar (2004) dengan judul penelitian “*interest rate Spreads and Mandatory Credit Allocations : Implications on Banks Loans to Small Business in Indonesia*”. Penelitian ini menganalisis perbankan di Indonesia sebelum dan

sesudah krisis moneter pada tahun 1997 dengan menggunakan pendekatan mikroekonomi perbankan. Model yang digunakan adalah profit Maximazation Model dengan formula :

$$PL_{it}^L = \beta_0 + \beta_1 (r_L - r_D) + \beta_2 (r_L - r_G)_{it} + \beta_3 gg_1 + \beta_4 crisis + \varepsilon_t \dots\dots\dots(1)$$

Di mana ($r_L - r_D$) adalah spread bunga kredit dengan deposito, $r_L - r_G$ adalah spread bunga kredit dengan SBI, gg adalah variabel dummy untuk kebijakan alokasi KUK, $crisis$ adalah kondisi moneter , PL adalah kontribusi KUK terhadap total kredit yang disalurkan perbankan. Model ini kemudian diuji dengan metode Autoregressive Distributed lag Error Corection Model pada tiga kelompok bank : Keseluruhan bank nasional, bank pemerintah, dan bank swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien $r_L - r_G$ positif yang bearti naiknya r_{SBI} akan menyebabkan menurunnya penyaluran KUK, ketiga kelompok bank (terutama swasta). Koefisien $r_L - r_D$ untuk bank pemerintah dan gabungan dua kelompok bank adalah negatif. Koefisien $r_L - r_D$ untuk bank swasta adalah positif yang bearti konsekuensi yang tidak diinginkan dari semakin tingginya spread terhadap penyaluran KUK. Koefisien dummy kebijakan alokasi adalah positif yang berarti kebijakan ini bertanggung jawab atas penurunan KUK yang disalurkan perbankan oleh gabungan bank pemerintah dan bank swasta. Namun, untuk bank pemerintah, pengaruh kebijakan ini dinilai tidak menurunkan penyaluran KUK karena adanya peran BRI dan BTN serta dukungan penuh BI terhadap kedua bank tersebut.

Pram Purnama Alam (2008) , dengan judul penelitian “ *Ananlisis Faktor-Faktor yang menyebabkan Peningkatan Non Performing Loan (NPL) dan*

dampaknya Terhadap penyaluran Kredit di Sektor UMKM (Studi Kasus di bank BRI). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL, LDR dan SBR. Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis dua model ekonometrika. Model pertama adalah hubungan antara nilai LDR (*Loan to Deposit Ratio*), tingkat bunga riil BRI, dan kebijakan BI terhadap NPL. Sedangkan model kedua adalah hubungan antara NPL dan trend terhadap jumlah kredit yang disalurkan BRI di sektor UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji statistika model pertama terdapat satu variabel bebas (KBI) yang berpengaruh secara tidak signifikan. Koefisien LDR bertanda negative menunjukkan hubungan antara NPL dan LDR yang berlawanan. Hal ini bearti bahwa semakin tinggi nilai LDR maka nilai NPL akan cenderung turun. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh kebijakan perbankan yang justru melakukan peningkatan jumlah pinjaman terhadap dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank koefisien LDR bernilai -0,061 yang bearti kenaikan nilai LDR 1 persen akan menyebabkan penurunan nilai NPL sebesar 0,061 persen.

Perry Warjiyo dan Chaikal Nuryakin (2005), dengan judul penelitian “Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia : kasusu pasar Oligopoli Periode Januari 2001-Juli 2005 “. Metode analisis yang digunakan adalah Generalized Two Stage Least Square (G2SLS) dan Baltagi Error Component 2SLS (EC2SLS). Variabel dependennya adalah penawaran kredit, sedangkan variabel indepennya adalah *spread* suku bunga kredit, perilaku maksimisasi laba, struktur pasar oligopolistik, kondisi internal perbankan, kebijakan moneter, preferensi bentuk invesatsi portofolio bank. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa *spread*

suku bunga bernilai positif, terdapat pengaruh maksimisasi laba terhadap penawaran kredit dengan tingkat kepercayaan 99 persen, struktur pasar oligopoly bernilai positif terhadap kredit. Sedang dari kondisi internal perbankan diperoleh data bahwa CAR bernilai negatif signifikan, NPL bernilai positif, DPK bernilai positif, dan BOPO bernilai negatif signifikan. Tidak ada perbedaan preferensi bank terhadap investasi portofolio kredit dan SBI.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Bank dalam penyaluran kreditnya memiliki factor-faktor dari sisi internal perbankan yang mampu mempengaruhi penyalurannya. Di dalam penelitian ini, terdapat tiga factor yang diduga berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit tersebut. Antara lain spread tingkat suku bunga kredit-simpanan, CAR dan NPL.

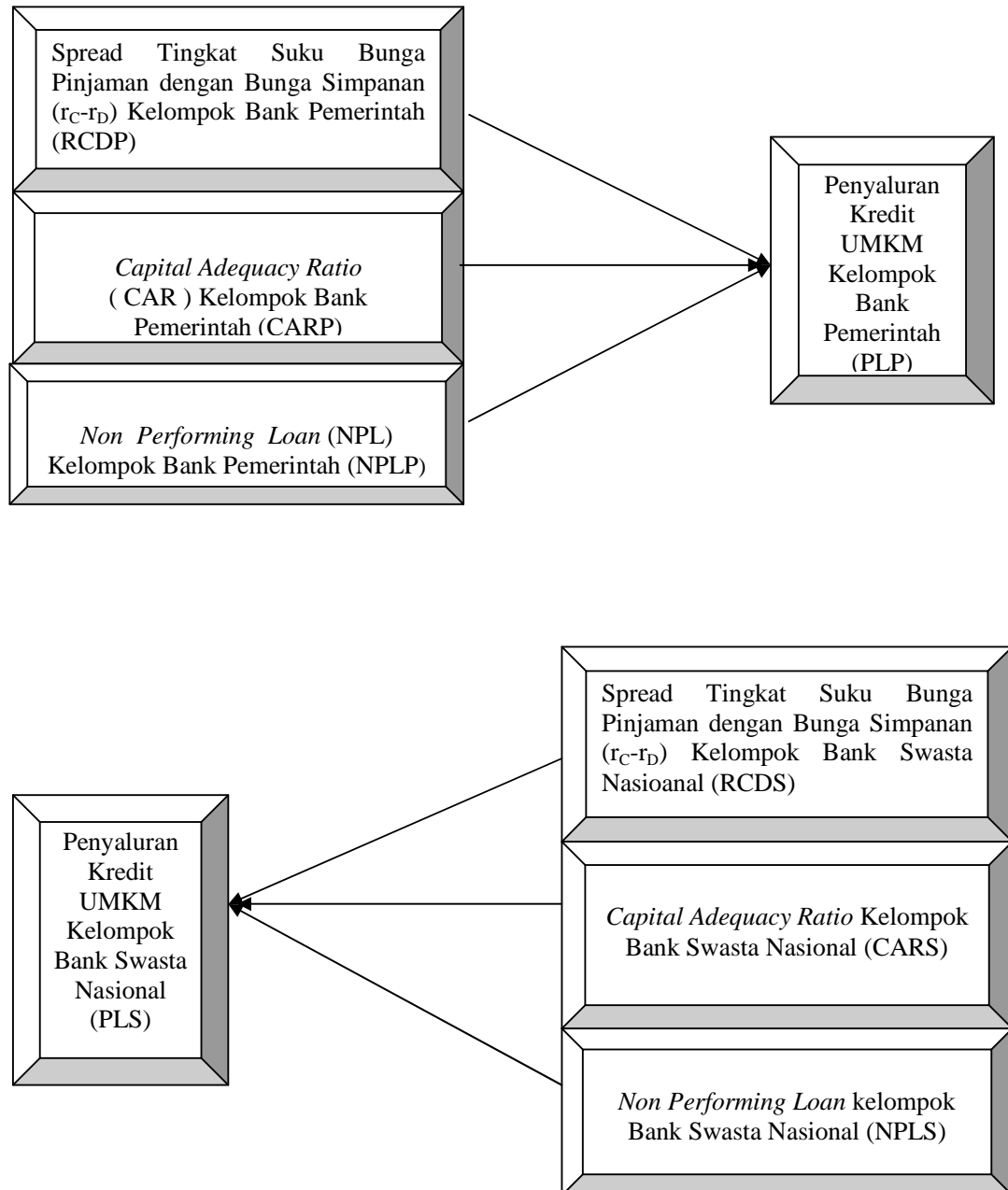
Spread tingkat suku bunga memiliki kaitan dengan penyaluran kredit karena di dalam usahanya bank mengharapkan tingkat keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut sebagian besar diperoleh dari selisih antara tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga simapan. Keuntungan ini akan semakin besar jika proporsi kredit yang disalurkan juga semakin besar nilainya, serta selisih atau margin tingkat bunga kredit dan simpanan meningkat.

Tingkat kecukupan modal yang diproksikan dengan *Capital adequacy Ratio* (CAR) memiliki kaitan dengan penyaluran kredit karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini. Sehingga penyaluran kredit oleh bank akan dipengaruhi oleh tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank.

Tingkat kolektabilitas kredit yang diproksikan dengan *Non Performing Loan* (NPL) juga memiliki hubungan yang erat dengan penyaluran kredit perbankan. Pada saat NPL meningkat berarti tingkat kolektabilitas kredit akan menurun yang menyebabkan bank mengalami hambatan dalam mengumpulkan modalnya. Dengan begitu, bank akan lebih berhati-hati.

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yaitu variabel independen antara lain spread tingkat suku bunga, CAR dan NPL yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM sebagai variabel dependen. Untuk memperjelas penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk skema berikut ini :

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Spread tingkat suku bunga pinjaman – simpanan ($r_C - r_D$) (RCDP) pada kelompok bank pemerintah berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM.
2. Spread tingkat suku bunga pinjaman – simpanan ($r_C - r_D$) (RCDS) pada kelompok bank swasta nasional berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM.
3. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (CARP) pada bank pemerintah berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM.
4. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) (CARS) pada bank swasta nasional berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit UMKM.
5. NPL (*Non Performing Loan*) (NPLP) pada bank pemerintah berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM.
6. NPL (*Non Performing Loan*) (NPLS) pada bank swasta nasional berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit UMKM.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependend dan variabel independen. Adapun pengertian dari kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta nasional periode Januari 2004-Desember 2010.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah spread tingkat suku bunga bank, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan* (NPL) kelompok bank pemerintah dan swasta nasional periode Januari 2004-Desember 2010.

Langkah selanjutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Langkah tersebut bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan sehingga memberikan petunjuk mengenai variabel yang akan diukur.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan jumlah penyaluran kredit UMKM yang disalurkan oleh kelompok perbankan pemerintah dan swasta nasional. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh spread tingkat suku bunga bank, CAR, dan NPL. Berikut ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Variabel, Definisi Operasional, dan Satuan Ukur Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Satuan Ukur
PLP	Penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah periode Jan 04-Des 10 (<i>Dependent Variable</i>)	Milyar (Rp)
PLS	Penyaluran kredit UMKM kelompok bank swasta nasional periode Jan 04-Des 10 (<i>Dependent Variable</i>)	Milyar (Rp)
RCDP ($r_C - r_D$)	Spread suku bunga pinjaman dengan simpanan perbankan pemerintah periode Jan 04-Des 10 (<i>Independent variable</i>)	Persen (%)
RCDS ($r_C - r_D$)	Spread suku bunga pinjaman dengan simpanan perbankan swasta nasional periode Jan 04-Des 10 (<i>independent variable</i>)	Persen (%)
CARP	<i>Capital Adequacy Ratio</i> kelompok bank pemerintah periode Jan 04-Des 10 (<i>independent variabel</i>)	Persen (%)
CARS	<i>Capital Adequacy Ratio</i> kelompok bank swasta nasional periode Jan 04-Des 10 (<i>independent variable</i>)	Persen (%)
NPLP	<i>Non Performing Loan</i> kelompok bank pemerintah Jan 04-des 10 (<i>Independent variable</i>)	Persen (%)
NPLS	<i>Non Performing Loan</i> kelompok bank swasta nasional Jan 04-Des 10 (<i>Independent Variable</i>)	Persen (%)

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan data runtut waktu (*time series*) yang tersedia di Statistik Perbankan Indonesia maka populasi yang di ambil adalah data statistik perbankan Indonesi dengan sampel data bulanan periode Januari 2004 hingga Desember 2010 kelompok bank pemerintah dan swasta nasional . Periode ini di ambil karena adanya keterbatasan data yang dapat di akses dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia , meliputi data spread tingkat suku bunga, *capital adequacy ratio* (CAR) dan *non performing loan* (NPL). Penentuan sampel diambil berdasarkan ketersediaan data dan tujuan dari penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time series*) periode Januari 2004-Desember 2010. Data sekunder yang digunakan antara lain :

1. Data spread tingkat suku bunga bank kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta nasional periode Januari 2004-Desember 2010 yang dinyatakan dalam satuan persen (*Sumber : Statistik Perbankan Indonesia*).
2. Data *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta nasional periode Januari 2004-Desember 2010 yang dinyatakan dalam satuan persen (*Sumber : Statistik Perbankan Indonesia*).
3. Data *Non Performing Loan* (NPL) kelompok bank pemerintah dan kelompok bank swasta nasional periode Januari 2004-Desember 2010 yang dinyatakan dalam satuan persen (*Sumber : Statistik Perbankan Indonesia*).

4. Data kredit UMKM yang disalurkan kelompok bank pemerintah dan swasta nasional periode Januari 2004-Desember 2010 yang dinyatakan dalam satuan milyar rupiah (*Sumber : Statistik Perbankan Indonesia*).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu penelitian, sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan pengumpulan yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Dengan demikian, untuk kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan data sekunder melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian (M. Nazir dalam Elvany Noor Afia , 2010). Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data spread tingkat suku bunga bank, CAR dan NPL kelompok bank pemerintah dan swasta nasional periode Januari 2004- Desember 2010 yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga terdapat data-data laporan tertulis yang terkait dengan penelitian ini dari berbagai studi kepustakaan seperti buku-buku, media massa dan internet.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah kecenderungan satu variabel, variabel tidak bebas, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau nilai

rata-rata variabel tidak bebas atas dasar nilai tetap variabel yang menjelaskan diketahui (Gujarati, 2004).

Hal yang perlu diperhatikan dalam perekonomian adalah jarang terdapat reaksi yang ditimbulkan oleh suatu aksi secara seketika. Namun, hal ini memerlukan selang waktu atau *time Lag* (kelambanan). Variasi variabel *dependent* pada periode berlaku tidak dapat ditentukan oleh variasi variabel *independent* pada periode yang sama, tetapi juga dipengaruhi oleh variasi di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, model yang selaras dengan kenyataan adalah model linier dinamis. Menurut Gujarati (2004), alasan adanya selang waktu atau *time lag* (kelambanan) adalah :

1. Alasan psikologi, misalnya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, seorang konsumen tidak akan mengubah konsumsinya seketika itu juga, apabila terjadi perubahan harga atau peningkatan pendapatan.
2. Alasan teknologi, misalnya suatu perusahaan tidak akan terburu-buru mensubstitusikan antara tenaga kerja dengan *capital* bila terjadi penurunan harga modal relatif terhadap harga tenaga kerja, meskipun hal itu tidak tepat untuk dilakukan. Terkadang pengetahuan yang tidak sempurna juga menjadi penyebab terjadinya kelambanan.
3. Alasan kelembagaan, misalnya suatu persetujuan kontrak dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk melakukan penggantian dari suatu input ke input lain dalam jangka pendek.

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model autoregresif *Error Correction Model* (ECM) yang diselesaikan dengan bantuan

program Eviews. Beberapa alasan model ECM digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Imam Ghazali, 2009) :

1. ECM adalah salah satu model autoregresif yang mengikut sertakan pengaruh pertimbangan *lag* dalam analisisnya sehingga model ini sesuai diterapkan dalam penelitian yang menggunakan data *time series*.
2. Kemampuan ECM dalam menganalisis berbagai variabel dapat digunakan untuk memperkirakan fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.
3. Dengan menggunakan ECM dapat dianalisis secara teoritik dan empiric apakah model yang dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data runtut waktu (*time series*) dengan periode bulanan . Model ini kemudian diuji atas dua kelompok bank, yaitu bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional. Dengan asumsi bahwa perbankan akan selalu memaksimalkan keuntungan, maka persamaan ECM (*Error Correction Model*) jangka panjang yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$PLP_t = \beta_0 + \beta_1 RCDP_t + \beta_2 CARP_t + \beta_3 NPLP_t + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|--|
| β_0 | : Konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | : koefisien regresi berganda |
| PLP_t | : Penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah pada periode t |

$RCDP_t$: Spread tingkat bunga perbankan kelompok bank pemerintah periode t

$CARP_t$: *Capital Adequacy Ratio* kelompok bank pemerintah periode t

$NPLP_t$: *Non Performing Loan* kelompok bank pemerintah periode t

ε_t : *Disturbance term*

$$PLS_t = \beta_0 + \beta_1 RCDP_t + \beta_2 CARP_t + \beta_3 NPLP_t + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

PLS_t : Penyaluran kredit UMKM kelompok bank swasta nasional pada periode t

$RCDP_t$: Spread tingkat bunga perbankan kelompok bank swasta nasional periode t

$CARP_t$: *Capital Adequacy Ratio* kelompok bank swasta nasional periode t

$NPLP_t$: *Non Performing Loan* kelompok bank swasta nasional periode t

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi berganda

ε_t : *Disturbance term*

Sementara hubungan jangka pendek dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\Delta PLP_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta RCDP_t + \beta_2 \Delta CARP_t + \beta_3 \Delta NPLP_t + \beta_4 ECT_{t-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan:

ΔPLP : *first difference* dari Penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah pada periode t

$\Delta RCDP$: *first difference* dari *Spread* tingkat bunga perbankan kelompok bank pemerintah periode t

$\Delta CARP$: *first difference* dari *Capital Adequacy Ratio* kelompok bank pemerintah periode t

$\Delta NPLP$: *first difference* dari *Non Performing Loan* kelompok bank pemerintah periode t

ECT_{t-1} : *Error - Correction term Lagged one period*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi berganda

ε_t : *Disturbance term*

t : menunjukkan waktu

$$\Delta PLS_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta RCDP_t + \beta_2 \Delta CARP_t + \beta_3 \Delta NPLP_t + \beta_4 ECT_{t-1} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (3.4)$$

Keterangan :

ΔPLS_t : *first difference* dari Penyaluran kredit UMKM kelompok bank swasta nasional pada periode t

$\Delta RCDP_t$: *first difference* dari *Spread* tingkat bunga perbankan kelompok bank pemerintah periode t

$\Delta CARP_t$: *first difference* dari *Capital Adequacy Ratio* kelompok bank swasta nasional periode t

$\Delta NPLP_t$: *first difference* dari *Non Performing Loan* kelompok bank swasta nasional periode t

ECT_{t-1} : *Error - Correction term Lagged one period*

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi berganda

ε_t : *Disturbance term*

Untuk mengetahui apakah spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid maka dilakukan uji terhadap koefisien Error Correction Term (ECT) . Jika hasil pengujian terhadap koefisien ECT signifikan, maka spesifikasi model yang diamati valid. Untuk menguji persamaan regresi dari model maka digunakan beberapa pengujian sebagai berikut :

3.5.1 Uji Stasioneritas

1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Sebelum melakukan analisis dalam penelitian ini perlu dilakukan uji terhadap kestasioneran data. Konsep terkini yang banyak dipakai untuk menguji kestasioneran data runtut waktu adalah uji akar unit (*unit root test*). Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtut waktu perlu dilakukan agar kesahihan analisis ECM (*Error Correctin Model*) terpenuhi. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan harus bersifat stasioner, atau dengan kata lain perilaku data yang stasioner memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya.

Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui adanya anggapan stasioneritas pada persamaan yang sedang diestimasi. *Unit roots* dapat diketahui dengan melakukan uji *Dickey-Fuller* (DF Test) sebagai berikut :

Misal variabel Y_t sebagai variabel tidak bebas, maka akan diubah menjadi

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + U_t \dots\dots\dots (3.5)$$

Jika koefisien Y_{t-1} (ρ) adalah = 1 dalam arti hipotesis diterima, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah trend yang bersifat non-stasioner menjadi stasioner dilakukan uji orde pertama (*first difference*)

$$\Delta Y_t = (\rho - 1)(Y_t - Y_{t-1}) \dots\dots\dots(3.6)$$

Koefisien ρ akan bernilai 0, dan hipotesis akan ditolak sehingga model menjadi stasioner. Hipotesis yang dikemukakan adalah :

$H_0 : \rho = 0$ artinya terjadi *unit root* (data tidak stasioner)

$H_a : \rho \neq 0$ artinya tidak terjadi *unit root* (data stasioner)

Kesimpulan hasil root test diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada *Dickey-Fuller table*.

2. Uji Kointegrasi

Kointegrasi berarti apabila terdapat variabel yang menunjukkan non-stokastik secara individu, tetapi stokastik pada kombinasi (hubungan) dua variabel atau lebih. Uji ini dilakukan apabila uji akar unit menunjukkan data runtut waktu terintegrasi pada derajat pertama. Dua variabel ini dikatakan terkointegrasi apabila terjadi keseimbangan dalam hubungan jangka panjang (Gujarati, 2004). Regresi yang terkointegrasi membuktikan bahwa terjadi kesesuaian dengan teori pada jangka panjang. Pengujian juga digunakan sebagai langkah awal untuk menghindari regresi yang kacau/*semrawut*. Uji kointegrasi dilakukan dengan melakukan uji akar unit atas residual dari persamaan regresi model utama.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2004), sebuah model penelitian secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi uji asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi autokorelasi.

a. Deteksi Normalitas

Deteksi asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari residual μ_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2004).

Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik persamaan regresi. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal/tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Terdapat beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera* (J-B) Test dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B Test, uji ini menggunakan hasil estimasi residual dari *chi-square probability distribution* kemudian membandingkan nilai J-B. Hitung (χ^2 hitung) dengan nilai χ^2 tabel, dengan aturan:

1. Apabila nilai J-B (χ^2) hitung $>$ nilai χ^2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ_t berdistribusi normal ditolak.
2. Apabila nilai J-B (χ^2) hitung $<$ nilai χ^2 tabel, maka hipotesa yang menyatakan bahwa residual μ_t berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Atau dengan melihat nilai probabilitasnya, jika nilainya lebih besar dari $\alpha = 5$ persen maka disimpulkan bahwa regresi berdistribusi normal.

b. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana residual pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2004). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Langrange Multiplier* (LM).

Dari hasil uji LM apabila nilai Obs*R-squared $>$ dari nilai χ^2 tabel *probability* χ^2 dengan $\alpha = 5$ persen menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-squared $<$ dari nilai χ^2 tabel *probability* χ^2 dengan $\alpha = 5$ persen menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2009).

c. Deteksi Heterokedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *disturbance term* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila *disturbance term* tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati and Porter dalam Elvany Noor, 2010) . Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews 6. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan $Obs*Rsquared$, secara khusus adalah nilai probability dari $Obs*Rsquared$. Dengan uji *White*, dibandingkan $Obs*R-squared$ dengan χ^2 (*chi-squared*) tabel. Jika nilai $Obs*R-squared$ lebih kecil dari pada χ^2 tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

d. Deteksi Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel *independent* yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 2004). Jadi multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent*.

Konsekuensi dari multikolinieritas adalah sebagai berikut: Apabila ada kolinieritas sempurna diantara variabel *independent*, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas antara lain dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan mengetahui seberapa jauh korelasinya (r^2) yang didapat dari hasil regresi bersama variabel independen dengan variabel dependen jika ditemukan nilai r^2 melebihi nilai R^2 pada model penelitian, maka dari model persamaan tersebut terdapat multikolinieritas, dan sebaliknya jika R^2 lebih besar dari semua r^2 maka menunjukkan tidak terdapatnya multikolinieritas pada persamaan yang diuji.

3.5.3 Uji Statistik

Gujarati (2004) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian signifikansi parameter individual (uji t), Signifikansi simultan (uji F) dan koefisien determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Imam Ghozali (2009) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel *dependent*. Nilai (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots\dots\dots(3.7)$$

dimana:

y^* = nilai y estimasi

y = nilai y aktual

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak

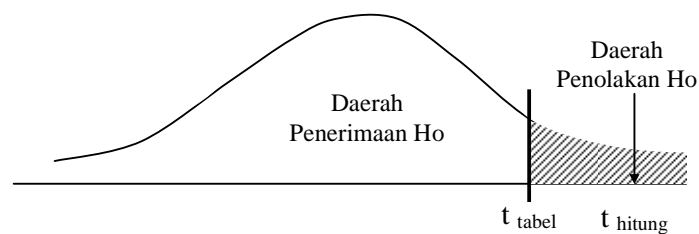
terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1. $H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel spread tingkat suku bunga kelompok bank pemerintah dan swasta nasional dengan penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional.
 $H_1 : \beta_1 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel variabel spread tingkat suku bunga kelompok bank pemerintah dan swasta nasional dengan penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional .
2. $H_0 : \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel CAR kelompok bank pemerintah dan swasta nasional dengan penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional.
 $H_1 : \beta_2 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel CAR kelompok bank pemerintah dan swasta nasional dengan penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional.
3. $H_0 : \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel NPL kelompok bank pemerintah dan swasta nasional dengan penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional.

$H_1 : \beta_3 < 0$ ada pengaruh negatif antara variable NPL kelompok bank pemerintah dan swasta nasional dengan penyaluran kredit UMKM kelompok bank pemerintah dan swasta nasional..

Kriteria dalam pengambilan keputusan untuk nilai t positif dapat diperjelas dengan melihat gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Uji t Hipotesis Secara Parsial ($H_0 \leq 0$) $\alpha = 0,05$

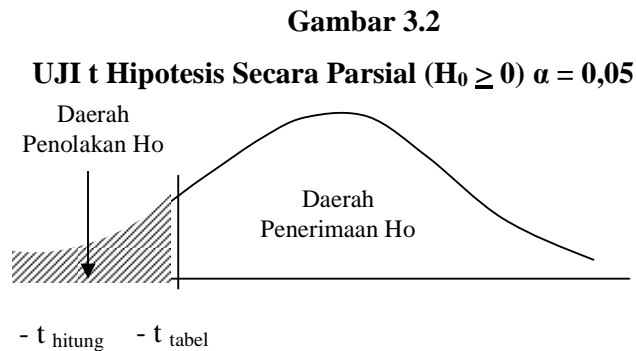


Sumber : J. Supranto, 2001

Berdasarkan kriteria gambar diatas maka untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk *nilai t positif* menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Diterima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_1 ditolak artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ditolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dalam pengambilan keputusan untuk *nilai t negatif* sebagai berikut :



Sumber : J. Supranto, 2001

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk nilai negatif menggunakan kriteria sebagai berikut :

- Diterima H_0 jika $-t_{tabel} > -t_{hitung}$ maka H_1 ditolak artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ditolak H_0 jika $-t_{tabel} < -t_{hitung}$ maka H_1 diterima artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2004)

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)} \dots\dots\dots (3.9)$$

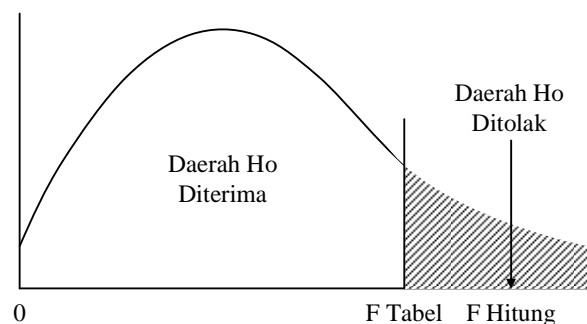
Dimana :

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk

N = jumlah observasi

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Gambar 3.3
Uji F Hipotesis Secara Simultan $\alpha = 0,05$



Sumber : J. Supranto, 2001

Berdasarkan kriteria gambar diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Diterima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka, H_1 ditolak artinya seluruh variabel independen bukan merupakan penjelas terhadap variabel dependen.

- Ditolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka, H_i diterima artinya seluruh variabel independen merupakan penjelas terhadap variabel dependen.